

# JPEB

## JURNAL PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS

---

**ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP NIAT MELAKUKAN  
WHISTLEBLOWING**

Sukma Indra

**MODEL KEBIJAKAN MODAL KERJA PADA UMKM DI DESA WISATA  
"CENGEK" TINGKIR LOR, SALATIGA**

Lenni Yovita, Bara Zaretta, Vinko Satrio Pekerti

**ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN SEBAGAI  
VARIABEL MEDIASI**

G. Tegoeh Boediono, Riana Sitawati, Sri Harjanto

**PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, STRUKTUR MODAL  
DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA  
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2017**

Amalia Nur Chasanah

**PERUSAHAAN KELUARGA DI INDONESIA: MANAGERIAL RENT  
EXTRACTION AND FIRM PERFORMANCE**

Melati Oktafiyani, Zaky Machmuddah

JPEB

Vol. 3

No. 1

Hal.  
1 - 60

Semarang  
Maret 2018

ISSN  
2442 - 5028 (Print)  
2460 - 4291 (Online)

## **AIMS AND SCOPE**

Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis (JPEB)'s primary objective is to disseminate scientific articles in the fields of management, economics, accounting, and islamic economics. This journal encompasses articles including but not limited to:

### **Management Science**

Marketing  
Financial management  
Human Resource Management  
International Business  
Entrepreneurship

### **Accounting Sciences**

Taxation and Public Sector Accounting  
Accounting information system  
Auditing  
Financial Accounting  
Management accounting  
Behavioral accounting

### **Economics**

Monetary Economics, Finance, and Banking  
International Economics  
Public Economics  
Economic development  
Regional Economy

### **Islamic Economics**

Islamic Economics Science  
Syaria Bankin  
Islamic Public Science  
Business & Halal Industry

## **PUBLICATION INFORMATION**

JPEB is a fully refereed (double-blind peer review) and an open-access online journal for academics, researchers, graduate students, early-career researchers and undergraduate students JPEB published by the Faculty of Economics and Business Dian Nuswantoro University Semarang twice a year, every March and September. JPEB is accept your manuscript both written in Indonesian or English.

## **OPEN ACCESS POLICY**

This Journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

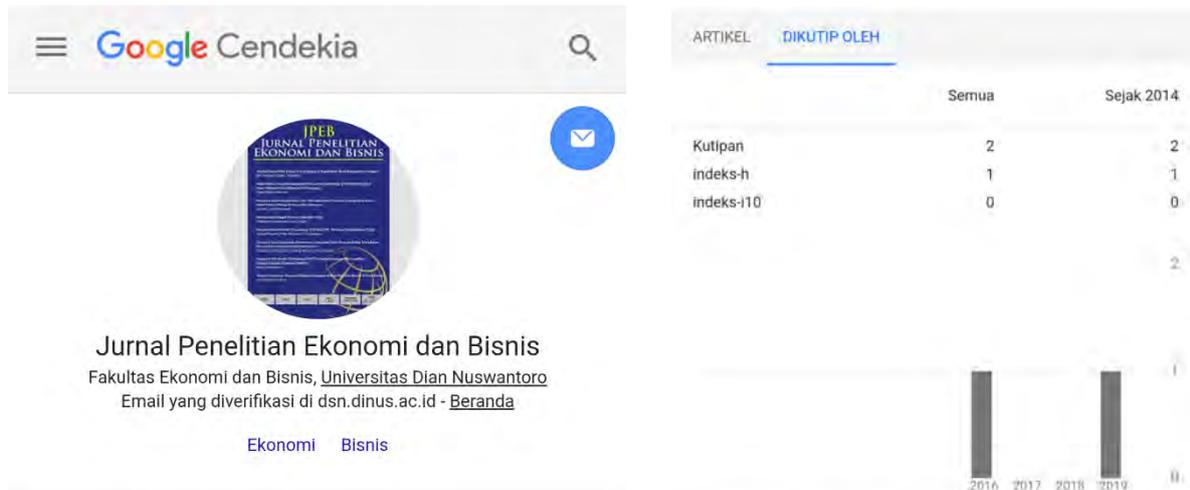
This journal is open access journal which means that all content is freely available without charge to users or institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to full text articles in this journal without asking permission from the publisher or author. This is in accordance with Budapest Open Access Initiative.



# JURNAL PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS

p-ISSN (print) 2442–5028  
e-ISSN (online) 2460–4291  
DOI Crossref 10.33633/jpeb

## GOOGLE SCHOLAR CITATION



## EDITORIAL TEAM

### EDITOR IN CHIEF

**Hertiana Ikasari**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia, Indonesia

### EDITORIAL BOARD

**Dwi Prasetyani**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

**Westri Kekalih**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang, Indonesia

**Sih Darmi Astuti**, [SCOPUS ID : 57188810445] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia

**Juli Ratnawati**, [SCOPUS ID: 57189502549] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia

**Amron Amron**, [SCOPUS ID: 57193011833] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia

**Enny Susilowati**, [SCOPUS ID: 57196194578] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia



## TABLE OF CONTENTS

Volume 3 Number 1 March 2018

Article	Page
<b>ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP NIAT MELAKUKAN WHISTLEBLOWING</b> DOI : 10.33633/jpeb.v3i1.2284 Sukma Indra	1-11
<b>MODEL KEBIJAKAN MODAL KERJA PADA UMKM DI DESA WISATA “CENGEK” TINGKIR LOR, SALATIGA</b> DOI : 10.33633/jpeb.v3i1.2285 Lenni Yovita, Bara Zaretta, Vinko Satrio Pekerti	12-21
<b>ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI</b> DOI : 10.33633/jpeb.v3i1.2286 G. Tegoeh Boediono, Riana Sitawati, Sri Harjanto	22-38
<b>PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, STRUKTUR MODAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2017</b> DOI : 10.33633/jpeb.v3i1.2287 Amalia Nur Chasanah	39-47
<b>PERUSAHAAN KELUARGA DI INDONESIA: MANAGERIAL RENT EXTRACTION AND FIRM PERFORMANCE</b> DOI : 10.33633/jpeb.v3i1.2288 Melati Oktafiyani, Zaky Machmuddah	48-60



## PENDAHULUAN

*Whistleblowing* adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun nonaktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. Seseorang yang melakukan *whistleblowing* disebut pelapor pelanggaran sebagai *whistleblower* (Semendawai, *et. al.*, 2011). Setiap orang bisa menjadi *whistleblower*, namun untuk menjadi seorang *whistleblower* bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan keberanian dan keyakinan untuk melakukannya. Seseorang yang berada dalam sebuah organisasi atau instansi umumnya akan menghadapi dilema etis dalam memutuskan apakah harus mengungkapkan atau membiarkannya. Di satu sisi sebagian orang mungkin memandang *whistleblower* sebagai penghianat perusahaan karena telah mengungkap rahasia perusahaan, di satu sisi lainnya sebagian memandang *whistleblower* sebagai pelindung heroik yang menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai moral yang dianggap lebih penting dari loyalitas kepada organisasi (Bagustianto & Nurkholis, 2015). Hal ini dikarenakan seorang *whistleblower* tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan teror dari oknum-oknum yang tidak menyukai keberadaannya. Seperti contoh kasus Novel Baswedan yang sering menghiiasi layar kaca pertelevisian baru-baru ini, penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras oleh dua orang yang belum diketahui saat Novel baru pulang sholat subuh berjamaah di masjid dekat rumahnya. Salah satu dugaan Novel Baswedan di siram air keras terkait dengan kasus besar yang tengah ditangani Novel di KPK yakni dengan kasus e-KTP.

Seorang *whistleblower* di negara barat rata-rata dijadikan *role model*/panutan (Vinten, 1992 dalam Malik 2010) atas tindakan berani mereka melaporkan tindakan tidak etis atau ilegal walaupun hal tersebut memberikan risiko yang besar terhadap karir pekerjaannya, kehidupan pribadi, maupun mental *outlook* terhadap mereka. Sejak awal 1990-an banyak negara didunia telah membuat peraturan perundang-undangan korporasi, undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang konsumen dan keuangan. Negara-negara ini antara lain Amerika Serikat, Australia, Kanada, Perancis, India, Jepang, Selandia Baru, dan Inggris (Semendawai, *et. al.* 2011).

Penelitian tentang *whistleblowing* sudah banyak dilakukan baik di luar negeri maupun di Indonesia. Beberapa penelitian memberikan hasil yang berbeda-beda, seperti Park *et al.*, (2008) yang melakukan penelitian terhadap sikap mahasiswa Korea Selatan, Turki dan Inggris menemukan bahwa terdapat perbedaan sikap antara mahasiswa di negara yang berbeda tersebut terhadap *whistleblowing*. Namun pada penelitiannya yang lain, dengan memasukkan variabel teori perilaku terencana Park dan Blenkinsopp (2009) menemukan bahwa sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat *whistleblowing*.

Sementara penelitian *whistleblowing* yang dilakukan di Indonesia, pernah dilakukan oleh Sulistomo (2012), Daivetri (2012), Malik (2010) dan Mellisa, *et. al.*, (2017) persepsi dan pengaruhnya terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi tentang norma subyektif, sikap, dan persepsi tentang kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa melakukan pengungkapan kecurangan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang membedakannya pada penelitian ini sampel yang menjadi responden bukan hanya mahasiswa dari jurusan akuntansi saja melainkan mahasiswa jurusan lain juga yang ada di FEB Untan. Berdasarkan penjabaran sebelumnya peneliti merasa perlu untuk mengetahui persepsi mahasiswa dalam melakukan tindakan *whistleblowing*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori pertukaran sosial dalam melakukan tindakan *whistleblowing*.

## TINJAUAN PUSTAKA

*Whistleblowing* merupakan sebuah proses yang kompleks dimana melibatkan faktor pribadi dan organisasi. Kebanyakan penelitian menunjukan bahwa karyawan yang lebih tua

dan lebih berpengalaman memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan *whistleblowing*. Hal ini dikarenakan semakin berpengalaman seseorang maka makin berkomitmenlah mereka kepada organisasi tempat mereka bekerja (Near & Miceli, 1985). Dengan demikian, muncul niat untuk melaporkan kecurangan yang dapat membahayakan keberadaan organisasi mereka.

Istilah *whistleblowing* ini muncul sejak adanya *Sarbanes Oxley Act 2002 (SOX)* di Amerika Serikat yang dapat mendorong para pegawai dari perusahaan untuk melakukan pelaporan atas tindakan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi tanpa ada rasa takut terhadap pihak yang dilaporkan.

Menurut Ajzen (2005), sikap adalah disposisi untuk merespon secara *favorable* atau *unfavorable* terhadap benda, orang, intansi atau kejadian. Menurut Assael (2001) sikap terhadap perilaku didefinisikan kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respon kepada obyek atau kelas obyek secara konsisten baik dalam rasa suka maupun tidak suka. Sedangkan menurut Mowen dan Minor (2002) sikap terhadap perilaku merupakan perasaan terhadap sebuah rangsangan. Berdasarkan dua definisi di atas sikap terhadap perilaku dapat dijelaskan bahwa sikap terhadap perilaku sebagai kecenderungan yang dipelajari untuk memberi respon atau menerima rangsangan terhadap obyek secara konsisten baik dalam rasa suka maupun tidak suka.

Sikap terhadap perilaku bukanlah sebuah perilaku, namun sikap terhadap perilaku merupakan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku (Assael, 2001). Seorang individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku yang dianggap positiflah yang nantinya akan dipilih individu untuk berperilaku dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sikap terhadap perilaku merupakan suatu wahana dalam membimbing seorang individu untuk berperilaku.

Norma Subyektif adalah pengaruh sosial yang mempengaruhi seorang individu untuk berperilaku. Seorang individu akan memiliki keinginan terhadap suatu obyek atau perilaku jika seandainya ia terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk melakukannya atau ia meyakini bahwa lingkungan atau orang-orang disekitarnya mendukung terhadap apa yang ia lakukan. Hogg dan Vaughan (2005) yang dikutip dalam Parianti *et. al.*, (2016) menyatakan bahwa norma subyektif adalah produk dari persepsi individu tentang kepercayaan/keyakinan yang dimiliki orang lain. Norma subyektif yaitu keyakinan individu untuk mematuhi arahan atau anjuran orang di sekitarnya untuk turut dalam melakukan aktifitas.

Ajzen (1991) mengartikan niat sebagai disposisi tingkah laku, yang hingga terdapat waktu dan kesempatan yang tepat, akan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Niat juga diartikan sebagai deklarasi internal untuk bertindak/melakukan sesuatu (Hogg dan Vaughan, 2005 yang dikutip dalam Parianti *et. al.*, 2016).

Teori lain yang digunakan adalah teori pertukaran sosial, dimana Cropanzano dan Mictchell (2005) menjelaskan bahwa dasar dari teori pertukaran sosial adalah hubungan yang meningkat dari waktu ke waktu dimana akan menjadi hubungan yang saling mempercayai, loyal, dan saling berkomitmen selama kedua belah pihak menaati aturan-aturan pertukaran. Peraturan mengenai pertukaran umumnya melibatkan hubungan timbal balik atau aturan membayar kembali dalam bentuk tindakan dari suatu pihak sebagai respon dari tindakan pihak lain (Cropanzano & Mictchell, 2005). Pendekatan pertukaran sosial mengintegrasikan keyakinan seorang individu tentang bagaimana seorang individu tersebut diperlakukan oleh organisasinya dan bagaimana organisasi berkomitmen kepada mereka (Eisenberger *et al.*, 1986). Dengan demikian, jika seorang individu percaya bahwa organisasi berkomitmen kepadanya maka seorang individu tersebut juga akan berkomitmen kepada organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori pertukaran sosial menjadi teori yang mendukung terjadinya niat melakukan tindakan *whistleblowing*.

Penelitian Sulistomo (2012) niat merupakan keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang muncul dari dalam diri setiap individu. Niat dapat dihubungkan dengan motivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jika tindakan tersebut dilakukan terus menerus, maka akan menciptakan suatu pribadi dengan perilaku yang dilakukannya secara terus menerus. Selain itu, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin mahasiswa memiliki persepsi lingkungan mahasiswa mendukungnya, dan sikap positif terhadap perilaku pengungkap kecurangan serta memiliki persepsi bahwa perilaku yang ditunjukkan nantinya merupakan hasil control diri sendiri dapat mempengaruhi mahasiswa akuntansi untuk memiliki niat mengungkap kecurangan.

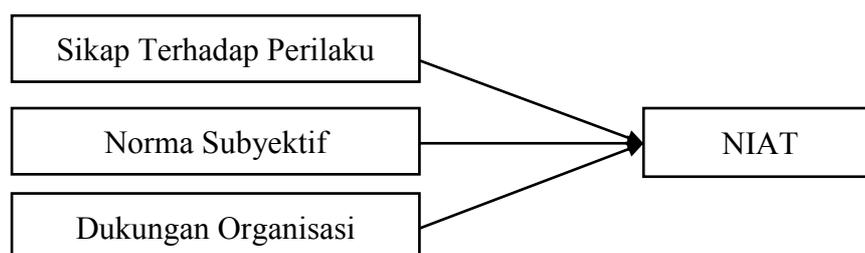
Mellisa et. al (2017), hasil penelitiannya menunjukkan pentingnya menunjukkan pentingnya etika dalam penyusunan kurikulum dan sistem pembelajaran, serta pentingnya teladan dari perilaku etis dosen dan lingkungan perkuliahan yang positif. Sementara, hasil penelitian Parianti et. al (2016) menunjukkan bahwa jika mahasiswa menunjukkan niat yang tinggi untuk melaporkan kecurangan cenderung akan melaporkan kecurangan yang ditemukannya dibandingkan dengan mahasiswa yang menunjukkan niat yang rendah.

### Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk melihat potensi niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing* dengan melihat sikap terhadap perilaku mahasiswa, norma subyektif mahasiswa dan dukungan organisasi yang mahasiswa rasakan, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat terjawab. Selain itu, untuk menjawab ini maka terdapat tiga hipotesis dari penelitian ini, yaitu :

- H<sub>1</sub> : Sikap terhadap perilaku berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing*
- H<sub>2</sub> : Norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing*.
- H<sub>3</sub> : Persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing*.

Penelitian ini menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar obyek penelitian, dengan maksud untuk mencari jalan penentuan penelitian lebih lanjut ataupun sekedar mencari tahu peristiwa yang terjadi sesungguhnya atau berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi. Selanjutnya data dianalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengambilan data purposive sampling. Data diambil dengan cara menyebarkan 400 kuesioner kepada mahasiswa di lingkungan FEB UNTAN. Di samping itu juga dipelajari dari dokumen – dokumen atau literature untuk pengayaan data.

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2013). Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

1. Sikap terhadap perilaku

Sikap terhadap perilaku adalah penilaian seseorang ketika melihat atau mengetahui suatu perilaku yang dilakukan. Seseorang akan memberikan suatu penilaian terhadap perilaku yang dilakukan seseorang. Penilaian yang diberikan dapat berupa hal yang positif maupun negatif.

2. Norma Subyektif

Norma subyektif adalah norma yang dihasilkan seseorang berdasarkan norma yang ada disekitarnya. Ajzen (1991) mendefinisikan norma subyektif sebagai tekanan yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Seseorang akan memiliki suatu norma yang diyakini dirinya sendiri. Tetapi, norma yang diyakininya tersebut memiliki pengaruh dari norma yang ada disekitar orang tersebut.

3. Dukungan Organisasi

Dukungan organisasi adalah keyakinan seorang individu mengenai penghargaan dukungan, dan perhatian yang diberikan organisasi atas kontribusi yang telah diberikan seorang individu serta kepedulian organisasi terhadap kesejahteraan anggotanya (Eisenberger *et al.*, 1986).

4. Niat

Niat adalah suatu keadaan dimana seseorang ingin melakukan suatu perilaku.

Metode analisis data menggunakan SPSS versi 23 yang dijalankan dengan media komputer. Teknik statistika multivarian yang dilakukan perbandingan antara variabel dependen dengan variabel independen dengan regresi liner berganda. Dimana akan membentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Niat

X<sub>1</sub> = Sikap Terhadap Perilaku (STP)

X<sub>2</sub> = Norma Subyektif (NS)

X<sub>3</sub> = Dukungan Organisasi (DO)

a<sub>0</sub> = Konstanta

a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub> = Koefisien

e = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dimulai dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura angkatan 2014 dan 2015. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada responden di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

**Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	400
Kuesioner yang kembali dari responden	346
Kuesioner yang tidak diisi lengkap	17
Kuesioner yang dapat diolah	329
Tingkat pengembalian kuesioner ( <i>respon rate</i> )	91,6 %

Koesioner disebar sebanyak 400 koesioner, namun yang kembali sebanyak 346 koesioner dan yang tidak lengkap pengisian koesioner dasa sebanyak 17 koesioner ehingga data yang dapat diolah sebanyak 329 untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya disajikan karakteristik dari responden dalam penelitian ini.

Jumlah responden mahasiswa reguler A sebanyak 190 orang atau 61,14% dan mahasiswa reguler B sebanyak 139 orang atau 39%. Responden dalam penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa angkatan 2014 dan 2015, dimana mahasiswa angkatan 2014 sebanyak 155 orang atau 45,85% dan mahasiswa angkatan 2015 sebanyak 124 orang atau 54,15%.

Berikut ini adalah hasil pengolahan data untuk melihat pengaruh antara variabel terikat dengan variabel-variabel bebas sehingga dapat terbentuk persamaan regresi linier berganda dari penelitian ini.

**Tabel 2. Hasil Regression Analysis**

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	t	Sig.
1 (Constant)	2.806	1.476	1.901	.059
STP	.163	.075	2.160	.032
NS	.326	.054	6.044	.000
DO	.313	.068	4.584	.000

a. Dependent Variable: Niat

Berdasarkan output pada tabel 6 di atas maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$DA = 2,806 + 0,163STP + 0,326NS + 0,313DO + e$$

Persamaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai koefisien dari Sikap Terhadap Perilaku (SPT) sebesar 0,163, hal ini menunjukkan bahwa SPT memiliki pengaruh ke arah positif terhadap Niat untuk melakukan *whistleblowing*. Artinya semakin kuat sifat mahasiswa terhadap perilaku pandangannya terhadap kecurangan maka niat untuk melakukan atau sebagai *whistleblowing* semakin meningkat.
2. Nilai koefisien dari Norma Subjektif (NS) sebesar 0,326, hal ini menunjukkan bahwa Norma Subjektif yang dimiliki oleh mahasiswa memiliki pengaruh ke arah positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing*. Artinya semakin besar norma subjektif yang dimiliki mahasiswa maka niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing* juga semakin meningkat.
3. Nilai koefisien dari Dukungan Organisasi (DO) sebesar 0,313, hal ini menunjukkan bahwa dukungan organisasi memiliki pengaruh ke arah positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing*. Artinya semakin besar dukungan organisasi maka niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing* semakin meningkat.

Penelitian ini memiliki tiga hipotesis yang perlu dilakukan untuk pembuktian atau pengujian niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing*. Adapun hasil dari uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis**

No	Hipotesis (H <sub>a</sub> )	t- hit	Prob	Keputusan Hipotesis
1	Sikap terhadap perilaku berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan <i>whistleblowing</i> .	2.160	.032	H <sub>a1</sub> diterima dan H <sub>o</sub> ditolak
2	Norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan <i>whistleblowing</i> .	6.044	.000	H <sub>a1</sub> diterima dan H <sub>o</sub> ditolak
3	Persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan <i>whistleblowing</i> .	4.584	.000	H <sub>a1</sub> diterima dan H <sub>o</sub> ditolak

Hasil uji hipotesis yang tampak pada tabel 8 menunjukkan bahwa ketiga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Karena ketiga hipotesis tersebut memiliki nilai signifikansi (probabilitasnya) lebih kecil dari 0,05. Nilai t statistic dari ketiga variabel tersebut menunjukkan nilai positif, masing-masing variabel sebesar 2,160 untuk sikap terhadap perilaku terhadap niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing*. Lalu 6,044 untuk norma subyektif yang dimiliki oleh mahasiswa terhadap niat dalam melakukan *whistleblowing* dan 4,584 untuk dukungan organisasi terhadap niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing*.

Secara umum teori menyatakan bahwa seseorang akan mempunyai sikap positif terhadap suatu perilaku apabila berhubungan dengan tujuan yang positif. *Whistleblowing* merupakan suatu tindakan yang bertujuan positif, yaitu keinginan melaporkan kecurangan-kecurangan yang ada disuatu organisasi. Jadi, semakin seorang individu tersebut mempunyai pemikiran bahwa suatu tingkah laku akan memberikan efek positif maka individu tersebut akan cenderung bersikap *favorable* pada suatu perilaku, begitu juga sebaliknya, semakin individu mempunyai pemikiran bahwa suatu perilaku akan memberikan efek negatif maka seseorang individu akan cenderung bersikap *unfavorable* terhadap perilaku tersebut (Ajzen, 2005).

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu “Sikap terhadap perilaku berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing*.” dapat diterima. Hasil ini memperkuat apa yang dikemukakan oleh Ajzen (2005) dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajzen (1991), Parianti *et. al.*(2016) dan Saud, Ilham Maulana (2016) yang menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mellisa *et. al.* (2017) yang menemukan bahwa sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*.

Selanjutnya hipotesis kedua dari penelitian ini juga dapat diterima, yaitu “Norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing*.” Hasil penelitian Ajzen (2005) yang mengemukakan ada pengaruh positif norma subyektif yang dimiliki mahasiswa yang ditunjukkan melalui tekanan sosial dari orang-orang disekelilingnya seperti teman, dosen dan orang tua terhadap niat mahasiswa (Ajzen, 2005) artinya penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan Ajzen (2005). Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sulistomo (2012),

Parianti *et. al.* (2016) dan Mellisa *et. al.* (2017) yang menjelaskan bahwa norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*.

Beberapa lembaga publik di Indonesia telah memiliki sistem penanganan pengaduan (*whistleblower system*) dan sistem ini sudah mulai diberlakukan secara efektif. Indonesia sendiri memiliki masyarakat dengan budaya kolektif, yaitu kehidupan sosial menjadi lebih dominan dalam keseharian dibandingkan dengan kehidupan pribadi.

Dukungan organisasi yang dirasa individu memiliki hubungan dengan perasaan mudah atau tidak untuk melakukan sesuatu perbuatan. Tindakan *whistleblowing* salah satunya, karena tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan sumber dan kesempatan yang dimiliki dan juga seberapa besar kemampuan untuk tidak melakukannya. Hal ini juga dapat dibuktikan dalam penelitian ini, dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa dukungan organisasi berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing* dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis yang ketiga ini sejalan dengan Adebayo (2005), Hooks *et al.*, (1994), Kaplan, S.E. dan Whitecotton, S.M. (2001) yang menunjukkan adanya hubungan antar tingkat dukungan organisasi dengan untuk mengungkapkan kecurangan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saud dan Maulana (2016) yang menemukan tidak ada pengaruh dari dukungan organisasi untuk melaporkan tindakan kecurangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pertukaran sosial, ketika seseorang ingin melaporkan kecurangan dan meyakini bahwa tidak akan mendapat ancaman atau sanksi baik secara ekonomi maupun sosial dari organisasi, maka akan menimbulkan dampak positif terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing* yang merupakan suatu tindakan yang bermanfaat bagi organisasi.

## SIMPULAN

Ketiga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Sehingga ketiga variabel bebas dalam penelitian ini yaitu sikap terhadap perilaku ( $X_1$ ), norma subyektif ( $X_2$ ) dan dukungan organisasi ( $X_3$ ) terbukti memiliki pengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Selain itu, hasil penelitian ini sesuai dengan teori pertukaran sosial yang mengungkapkan bahwa orang akan melakukan suatu tindakan yang tidak akan mengancam atau merugikan dirinya. Penelitian mengenai *whistleblowing* di masa mendatang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan mempertimbangkan untuk menambah variabel yang mampu mempengaruhi perilaku *whistleblowing* seperti variabel demografi dan komitmen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adebayo, D. O. 2005. Ethical Attitudes And Prosocial Behaviour In The Nigeria Police : Moderator Effects Of Perceived Organizational Support And Public Recognition. Policing : An International. *Journal of Police Strategies and Management*, 28 (4): 684–705.
- Ajzen, I. 1988. *Attitudes, personaliQ, and behavior*. Chicago, IL : Dorsey.
- Ajzen, Icek. 1991. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50 (2) :179-211.
- Ajzen, Icek. 2005. Laws of human behavior : symmetry, compatibility, and attitude behavior correspondence. in a. Beauducel, B. Biehl, M. Bosniak, W. Conrad, G. Schonberger, & D. Wagener (Eds.), *Multivariate Research Strategies* (pp. 3-19). Aachen, Germany : Shaker Verlag.
- Ajzen, I dan Fishbein M. 2010. *Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour*. Englewood Cliffs. NJ : Prentice Hall

- Alfani, Ulin Nuha. 2016. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Alleyne, P., M. Hudaib, R. Pike. 2013. Towards a Conceptual Model of Whistleblowing Intention Among External Auditors. *The British Accounting Review*, 45: 10-23.
- Assael, Henry. 2001. *Consumer Behavior 6<sup>th</sup> Edition*. New York: Thomson-Learning.
- Bagustianto, Rizki & Nurkholis. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pengawai Negeri Sipil (PNS) untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi pada PNS BPK RI)*. e-jurnal Universitas Brawijaya.
- Chiu, R.K., 2003. Ethical Judgment and Whistleblowing Intention : Examining The Moderating Role of Locus of Control. *Journal of Business Ethics*.43: 65-74.
- Carpenter, Tina D., and Jane L. Reimers. 2005. Unethical and Fraudulent Financial Reporting : Applying the Theory of Planned Behavior. *Journal of Business Ethics*. 60: 115-129.
- Cropanzano, R. dan M. S. Mitchell. 2005. Social Exchange Theory: An Interdisciplinary Review. *Journal of Management*. 31: 874-900.
- C. Mowen, John. Michael Minor. 2002. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Erlangga
- Daivitri, A.A.I. Niyaratih. 2013. Pengaruh Pertimbangan Etis dan Komponen Perilaku Terencana pada Niat Whistleblowing Internal dengan Locus of Control sebagai Variabel Pemoderasi. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta.
- Detik Com. 2008. Kasus kecurangan Urip Tri Gunawan. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/902725/kronologi-penangkapan-jaksa-urip> Pada tanggal 10 Desember 2017
- Destriana, Kurnia Kreshastuti. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Auditor Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Semarang)*, Jurnal, Semarang : Undip.
- Eisenberger, R., R. Huntington, S. Hutchinson, dan D.Sowa. 1986. Perceived organizational support. *Journal of Applied Psychology* 71(3): 500–507.
- Elias. 2008. *Auditing Student Professional Commitment and Anticipatory Socialization and Their Relationship to Whistleblowing*, *Managerial Auditing Journal*. 23(3): 283-294.
- Ghozali, Imam. 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progra IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawaty,& Yulius. 2008. Profesionalisme Pengetahuan Akuntan Publik Dalam Mendeteksi Kekeliruan, Etika Profesi Dan Pertimbangan Tingkat Materialitas”. *Trisakti school of management*. Jakarta.
- Hudson, Simon. 2008. *Tourism And Hospitality Marketing : A Global Perspective*. London : SAGE Publication Ltd.
- Hussein, Ananda Sabil. 2015. *Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan smartPLS 3.0*. Modul Ajar. Universitas Brawijaya.
- Hooks, et. al. 1994. Enhancing communication to assist in fraud prevention and detection. *Auditing : A Journal of Practice & Theory*. 13 (2): 86–117.
- Hwang, et. al. 2008. “Confucian Culture and Whistleblowing by Professional Accounting: an exploratory study”. *Managerial Auditing Journal*., 23 (5):. 504-526
- Ilham, Maulana Saud. 2016. Pengaruh Sikap dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Whistleblowing Internal-Eksternal dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi”. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. 17 (2): 209-219
- Indriantoro, dan Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*., Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Jogiyanto dan Abdillah. 2009. *Konsep dan Aplikasi PLS (partial least square) untuk penelitian empiris*. Yogyakarta : BPFE

- Jogiyanto, H. 2011. *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : STIM YKPN.
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Kaplan, S. E. dan S. M. Whitecotton. 2001. An examination of the auditors' reporting intentions when another auditor is offered client employment. *Auditing : A Journal of Practice and Theory*. 20 (1): 45–63.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2015. Niat. Diakses dari <http://kamusbahasaindonesia.org/niat>. Pada tanggal 8 Septembet 2017.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2008. *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SSP (Whistleblowing System-WBS)*. Jakarta.
- Kompas Nasional. 2008. Kasus kecurangan Burhanuddin Abdullah. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2008/10/29/12144047/Burhanuddin.Abdullah.Divonis.Lima.Tahun.Pada.tanggal.10.Desember.2017>.
- Kompas Nasional. 2011. Kasus kecurangan Muhammad Nazaruddin. Diakses dari <http://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/2742/kasus.korupsi.akil.mochtar.Pada.tanggal.10.Desember.2017>.
- Kompas Nasional. 2013. Kasus kecurangan Akil Mochtar. Diakses dari <http://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/2742/kasus.korupsi.akil.mochtar.Pada.tanggal.10.Desember.2017>.
- Kreshastuti, Destriana Kurnia. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Auditor Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi Empiris Pada KAP Di Semarang). *Journal Of Accounting*.3 (2).
- Kreitner dan Kinicki. 2005. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kuningsih, Reni Sekar. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Akuntansi Untuk Berkarir Sebagai Akuntan Profesional. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keprilakuaan*. Jakarta : Salemba Empat. Jakarta.
- Malik, Rahardian. 2010. Analisis perbedaan komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif mahasiswa PPA dan Non-PPA pada hubungannya dengan Whistleblowing". *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mellisa, et, al. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Stie Asia Malang). *JIBEKA*. 11 (1) : 56-63.
- Near, J. P., & Miceli, M. P. 1985, Februari. Organizational dissidence : The case of whistleblowing. *Journal of Business Ethics*. 4(1): 1-16
- Park, et al. 2008. "Cultural Orientation and Attitudes Towards Different Forms of Whistleblowing : a comparison of South Korea, Turkey and the UK". *Journal of Business Ethics*. 82 (4): 929-939.
- Park, dan Blenkinsopp, John. 2009. Whistleblowing as Planned Behaviour – A Survey of South Korean Police Officer. *Journal of Business Ethics*. 85:545-556.
- Parianti, et, al. 2016. Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Niat Dan Perilaku Whistleblowing Mahasiswa Akuntansi. . E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Pedoman Penulisan Karya Akhir. 2016. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
- Rhoades, L., & Eisenberger, R. 2002. Perceived organizational support : a review of the literature. *Journal of Applied Psychology*. 87 (4): 698-714
- Sagara, Yusuf. 2013. Profesionalisme Internal Auditor Dan Intensi Melakukan Whistleblowing. *Jurnal Liquidity*.

- Saud, Ilham Maulana. 2015. Pengaruh Faktor Individual Dan Faktor Situasional Terhadap Niat whistleblowing Internal-eksternal Dengan Variabel Pemoderasi Persepsi Dukungan Organisasi. Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Semendawai, *et al.* 2011. *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Singgih, Santoso. 2007. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Eleks Media Komputindo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-19, Oktober 2013. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sulistomo, Akmal. 2012. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi UNDIP dan UGM). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Trongmateerut & Sweeney. 2012. The Influence of Subjective Norms on Whistleblowing: A Cross Cultural Investigation. *Journal of Bussiness Ethics*. 112 (3) : 437-451.
- Wiyono, Gendro. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17,0& SmartPLS 2.0*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Yobapritika, Layli. 2014. Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan terhadap Niat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Zhang, *et. al.,*. 2008. Decision-Making Process of Internal Whislteblowing Behavior in China: Empirical Evidence and Implications. *Journal of Business Ethics*. 88 : 25-41.





## PENDAHULUAN

Modal kerja adalah faktor fundamental dalam aktivitas operasional sebuah usaha. Ibarat pelumas mesin, begitupun modal kerja mempunyai fungsi yang sama, yaitu memperlancar keberlangsungan usaha. Modal kerja juga merupakan dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari (Riyanto, 2013). Modal kerja dialokasikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan, dan lain sebagainya perlu diatur. Pada umumnya ia akan bersiklus dalam periode tertentu, dan diharapkan akan menuai hasil yang lebih daripada modal kerja awal.

Perencanaan dan pengelolaan modal kerja tentu harus bijak dan tepat sesuai sasaran sehingga memudahkan operasionalisasi usaha dan berpotensi terhindar dari pailit sehingga memerlukan kebijakan modal kerja yang sesuai. Tiga konsep kebijakan modal kerja (Riyantor, 2013) yaitu kuantitatif, kualitatif dan fungsional. Letak perbedaan paling menonjol adalah pada besaran prosentasi penggunaan aktiva lancar. Sedangkan tipe kebijakan modal kerja berdasarkan pengembangan konsep kebijakan modal kerja adalah konservatif, moderat (hedging), dan agresif (Weston dan Copeland, 2012). Skala perusahaan mulai dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) hingga usaha berskala besar memerlukan kebijakan modal kerja yang efisien dan taktis.

UMKM mulai berkembang pesat pada lima tahun terakhir. Tercatat bahwa UMKM memberikan kontribusi positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 57, 84% (2011) meningkat menjadi 60, 34% (2016). UMKM juga menunjukkan prestasinya dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu dari 96, 99% meningkat hingga 97,22% dalam kurun waktu lima tahun terakhir (BPS, 2016). Rekam jejak UMKM yang baik harus mendapatkan perhatian pemerintah. Walaupun bukan usaha berskala nasional bahkan multinasional, akan tetapi UMKM terbukti menjadi kontributor signifikan dalam peningkatan Produk Domestik Bruto. Hal tersebut juga selaras dengan penelitian Tambunan (2011) yang menyatakan bahwa selain sebagai sumber ketenagakerjaan, usaha skala kecil hingga menengah (Small to Medium Enterprises) berpotensi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ironisnya, UMKM mempunyai beberapa kendala dalam operasionalisasi usaha, yaitu kesulitan pemasaran dan bahan baku, keterbatasan – keterbatasan dalam hal akses ke sumber pembiayaan sumber daya manusia (SDM), inovasi dan teknologi (Roeslani, 2016)

Salatiga merupakan kota kecil yang sejuk, berlokasi di kaki gunung Merbabu Jawa Tengah serta secara administrasi terletak diantara kabupaten Semarang dan Boyolali. Salah satu desa di Salatiga yaitu Desa Tingkir Lor telah ditetapkan dengan SK Walikota Nomor : 556/349/2015 sebagai lokasi pengembangan Desa Wisata. UMKM tumbuh pesat seiring dengan perkembangan Desa Wisata.

Hasil produksi yang dihasilkan Desa Tingkir Lor (Cengek) bervariasi. Produk yang dihasilkan berupa pakaian pakai seperti baju, celana, jaket, kaos, dan atribut muslim seperti kerudung. Produk lain yang dihasilkan adalah spreng, sarung bantal dan guling, selimut yang berbahan dasar macam – macam kain. Sebagian besar industri di desa ini bergerak di bidang konveksi. Akan tetapi, terdapat pula usaha lainnya yaitu kuliner seperti: bakpia, keripik, dan krecek. Adapula beberapa industri rumah tangga yang menjadi pengrajin tempe. Sebagian kecil lainnya menjadi ternak ikan serta pengrajin alat rumah tangga seperti sapu, kemoceng, sikat dan sebagainya.

Mayoritas pelaku UMKM di Desa Wisata Cengek menerapkan konsep dan tipe kebijakan modal kerja kuantitatif – konservatif. Hal ini disebabkan adanya tingkat kesulitan untuk memperoleh pembiayaan dari kreditur, yaitu perbankan sehingga terkendala dalam pengembangan usaha. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Sunday (2011) dan Tambunan (2011) yang menyatakan bahwa perusahaan kecil mengalami kesulitan finansial karena tidak memenuhi persyaratan pemberian kredit oleh perbankan. 75% pelaku UMKM di

desa tersebut menggunakan aktiva lancar yang bersumber dari modal internal. Sehingga aspek tujuan studi ini adalah untuk mengetahui modal kerja pada UMKM di Desa Wisata Cengek, Salatiga dan selanjutnya memberikan rekomendasi dari hasil studi ini.

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi UMKM di Desa Cengek, Salatiga sebagai bentuk pembelajaran dan wacana tentang kebijakan modal kerja. Begitu juga dalam dunia pendidikan, bahwa hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan ajar.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Modal Kerja

Tiga konsep modal kerja (Riyanto, 2013), antara lain :

1. Kuantitatif  
Modal kerja terdiri dari seluruh jumlah aktiva lancar. Konsep ini biasa disebut modal kerja bruto (*gross working capital*). Modal kerja konsep kuantitatif hanya menekankan aspek ketersediaan dana jangka pendek untuk operasional usaha rutin.
2. Kualitatif  
Modal kerja konsep kualitatif lebih luas cakupannya karena sudah memasukkan elemen hutang lancar. Sebagian aktiva lancar harus bisa mendanai seluruh aktivitas operasional rutin perusahaan, sedangkan sebagian sisanya digunakan untuk membayar hutang lancar.
3. Fungsional  
Modal kerja konsep fungsional menekankan fungsi dana dalam memproduksi pendapatan. Tidak semua dana akan dihabiskan dalam periode sekarang akan tetapi ada kemungkinan akan digunakan untuk periode yang akan datang.

Setiap usaha berbeda-beda dalam menentukan Model atau tipe kebijakan modal kerja. Penentuan tersebut disesuaikan dengan karakter, skala, visi misi dan jenis usaha. Menurut Weston dan Copeland (2012) , terdapat 3 (tiga) tipe atau Model kebijakan modal kerja, yaitu:

1. Kebijakan Konservatif  
Pada kebijakan Model konservatif, penetapan tingkat aktiva lancar yang relatif tinggi mengakibatkan likuiditas perusahaan tinggi. Implikasi selanjutnya adalah terjadi resiko kekurangan persediaan atau kehilangan kesempatan penjualan yang rendah akan tetapi profitabilitas rendah.
2. Kebijakan Moderat  
Kebijakan Model moderat (*hedging*) merupakan perpaduan diantara dua kebijakan sebelumnya. Penetapan tingkat aktiva lancar rata - rata yang relatif cukup mengakibatkan likuiditas pada level moderat alias sedang. Implikasi selanjutnya adalah terjadi tingkat penjualan yang moderat dan profitabilitas perusahaan sedang.
3. Kebijakan Agresif  
Pada kebijakan Model agresif, penetapan tingkat aktiva lancar rata - rata yang relatif rendah mengakibatkan likuiditas rendah. Implikasi selanjutnya adalah terjadi resiko kekurangan persediaan atau kehilangan kesempatan penjualan tinggi sehingga profitabilitas perusahaan tinggi. Tabel 1 dibawah ini merupakan ringkasan Model atau tipe kebijakan modal kerja :

**Tabel 1. Tingkat Likuiditas, Profitabilitas, dan Risiko pada Tiga Kebijakan**

	<b>Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Rendah</b>
Likuiditas	Konservatif	Moderat	Agresif
Profitabilitas	Agresif	Moderat	Konservatif
Risiko	Agresif	Moderat	Konservatif

4 (empat) faktor yang menentukan kebutuhan modal kerja perusahaan (Hampton, 2011), yaitu :

1. Volume Penjualan  
Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung potensi peningkatan volume penjualan.
2. Faktor Musim dan Siklus  
Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja.
3. Perubahan dalam Teknologi  
Jika terjadi pengembangan teknologi maka akan berhubungan dengan proses produksi dan akan membawa dampak terhadap kebutuhan akan modal kerja
4. Kebijakan Perusahaan  
Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan juga akan membawa dampak terhadap kebutuhan modal kerja.

### **Penelitian Terdahulu**

Miswanto (2012) melakukan studi literatur tentang kebijakan dalam penentuan dan pendanaan modal kerja. Hasil studinya adalah (1) bilamana aktiva lancar temporer dibiayai dengan pendanaan jangka pendek mengandung resiko dan profitabilitas yang moderat, (2) bilamana aktiva lancar temporer dibiayai dengan pendanaan jangka panjang mengandung resiko dan profitabilitas yang rendah, (3) bilamana aktiva lancar permanen dibiayai dengan pendanaan jangka pendek akan mengandung resiko dan profitabilitas tinggi, (4) bilamana aktiva lancar permanen dibiayai dengan pendanaan jangka panjang akan mengandung resiko dan profitabilitas yang moderat, (5) untuk menganalisis modal kerja bisa digunakan alat analisis rasio keuangan, analisis sumber dan penggunaan dana, dan analisis aliran kas.

Sadiq (2017) menguji pengaruh modal kerja terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Nigeria. Hasil pengujian menunjukkan bahwa periode hutang dagang, siklus konversi kas, dan siklus perdagangan bersih berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Periode piutang dagang dan perputaran persediaan dalam satuan hari mempunyai hubungan yang negative dengan kinerja perusahaan.

Sunday (2011) melakukan penelitian yang berjudul *Effective Working Capital Management in Small and Medium Scale Enterprises (SMEs)*. Hasilnya : (1) bahwa perusahaan skala kecil mempunyai kelemahan finansial karena sangat tergantung dengan fasilitas kredit, (2) banyak perusahaan kecil tidak mampu membayar seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang (*insolvable*) dikarenakan kesulitan mendapatkan bantuan keuangan sebab tidak memenuhi persyaratan mendapatkan kredit, (3) aliran modal kerja yang rendah menjadikan perusahaan kecil tidak mampu berkompetisi

Penelitian Tambunan (2011) tentang *Development of Small and Medium Enterprises in Developing Country-The Indonesia Case*, menunjukkan hasil yaitu (1) UMKM adalah pemain utama dalam menggerakkan perekonomian negara karena jumlah mereka hampir 99.9% dari jumlah keseluruhan perusahaan domestic, (2)UMKM mempunyai kesulitan

keuangan dan keterbatasan pemasaran, (3) inovasi UMKM sangat rendah, (4). Pengusaha wanita masih sedikit akibat kendala pendidikan, pandangan budaya dan agama.

Sugiyono (2015) melakukan penelitian tentang penggunaan dan penyediaan modal kerja UMKM dalam meningkatkan laba KUB (Kelompok Usaha Bersama) Alam Lestari Depok. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyediaan dan penggunaan modal kerja KUB lestari didasarkan pada sifat umum perusahaan, waktu produksi, tingkat perputaran persediaan, tingkat perputaran piutang, dan pengaruh konjungtur

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di Desa Wisata, Cengek Salatiga, yaitu 72 UMKM. Peneliti mengambil sampel UMKM di Cengek berdasarkan kriteria kesamaan usaha. Pada Sentra industri konveksi desa wisata Tingkir lor terdapat 5 (lima) jenis spesialisasi konveksi, yaitu: pembuat sprei dan bed cover, celana kolor, hijab, pakaian umum dan campur. Setiap jenis spesialisasi UMKM akan diambil sampel secara proporsional yaitu 20%.

Maka kriteria sampel diatas telah memperoleh sampel sebanyak 20 UMKM dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. Seleksi sampel**

Kriteria	Jumlah
Seluruh pengusaha UMKM di Tingkir Lor	72
Spesialisasi UMKM :	
a. Sprei dan bed cover : 16 (20%)	4
b. Celana kolor : 21 (20%)	3
c. Hijab : 3 (20%)	5
d. Pakaian umum : 20 (20%)	1
e. Campur : 12 (20%)	4
	3
Total	20

Metode pemilihan sampel menggunakan pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*) berdasarkan kuota. Metode tersebut bertujuan untuk menaikkan representative sampel penelitian (Indriantoro dan Soepomo, 2011)

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer sekaligus data sekunder dengan teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara responden yaitu 20 pengusaha UMKM di Desa Wisata Cengek, Salatiga.

### Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah Kebijakan modal kerja. Pada tabel 3.1 berikut ini memaparkan definisi operasional beserta indikator variabel:

**Tabel 3. Variabel, Indikator, dan Definisi Operasional Penelitian**

Variabel	Indikator	Definisi Operasional
Model Kebijakan Modal Kerja	Kelas I Konservatif	<u>Aktiva Lancar</u> Penjualan
	Kelas II Moderat	<u>Aktiva Lancar</u> Penjualan
	Kelas III Agresif	<u>Aktiva Lancar</u> Penjualan

Jumlah aktiva lancar yang relatif besar mengakibatkan likuiditas tinggi.

Jumlah aktiva lancar rata-rata yang relatif cukup mengakibatkan likuiditas pada level moderat alias sedang

Jumlah aktiva lancar rata-rata yang relatif rendah mengakibatkan likuiditas rendah

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan kuantitatif, yaitu dengan cara dan tahapan sebagai berikut :

1. Membandingkan Aktiva lancar dan penjualan
2. Hasil perbandingan pada butir 1(satu) yang berupa angka absolut dikonversi menjadi prosentase
3. Menyajikan hasil perbandingan atau perhitungan butir 2(dua) ke dalam tabel distribusi frekuensi
4. Membentuk 3 kelas interval pada hasil perhitungan di butir 2 ke dalam 3 kelas kebijakan yang telah dibuat dengan interval kelas atau jangkauan kelas dengan tahapan :
  - a. Mengurutkan nilai data dari yang terkecil ke terbesar
  - b. Membuat 3 kelas interval yang disesuaikan dengan 3 kategori kebijakan yaitu Kelas I – Kebijakan Konservatif, Kelas II – Kebijakan Moderat, Kelas III – Kebijakan Agresif
  - c. Mencari panjang interval kelas dengan formula : Panjang kelas (PK) = (nilai terbesar – nilai terkecil ) / Jumlah kategori
  - d. Menghitung banyaknya frekuensi per kelas kebijakan modal kerja
5. Tahap selanjutnya adalah membuat kesimpulan dengan dasar perhitungan frekuensi pada butir 5d (lima d) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Hasil wawancara terhadap 20 pengusaha UMKM konveksi di Desa Wisata, Tingkir Lor Salatiga dan observasi langsung tentang prospektus bisnis telah memunculkan data berikut ini :

### Sumber Pendanaan

**Tabel 4. Sumber Pendanaan Pengusaha UMKM di Desa Wisata Tingkir Lor, Salatiga**

No	Umur Bisnis	Jumlah Pengusaha UMKM	Sumber Pendanaan		
			Internal	Eksternal	Internal dan Eksternal
1	< 1 tahun	2	2	0	0
2	1-5 tahun	4	1	0	3
3	> 5 tahun	14	0	0	14
Total		20	3	0	17

Berdasarkan tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa pengusaha UMKM yang mempunyai umur bisnis kurang dari 1 (satu ) tahun belum mempunyai keberanian untuk menggunakan dana eksternal, yaitu kredit dari perbankan.

Lain halnya dengan para pengusaha UMKM yang mempunyai umur bisnis lebih dari 1(satu) tahun lebih mempunyai keberanian menggunakan sumber pendanaan eksternal. Hal tersebut dikarenakan rata-rata pengusaha UMKM tersebut sudah mempunyai gambaran bisnis ke depan mereka. Selain itu, pengalaman berbisnis konveksi lebih dari satu tahun menjadikan mereka lebih percaya diri dalam mengelola dana kucuran perbankan. Seperti yang diungkapkan Mariyani (50 tahun). Ibu dari 2 putra ini sudah menjalankan usaha konveksi selama 20 tahun. Ibu Mariyani sering memadukan sumber pendanaan baik internal maupun eksternal. Histori bisnis Ibu Mariyani telah memotret tren bisnis yang dijalankan semakin mempunyai kapasitas besar. Awal berdiri usahanya hanya memproduksi bahan kain kiloan hanya satu kilo hingga ratusan kilo dan telah mempunyai 3 outlet di Salatiga. Menurutnya, dukungan perbankan menjadi salah satu faktor kesuksesan usahanya.

Tinjauan secara keseluruhan bahwa 17 (85%) dari 20 responden menggunakan perpaduan sumber pendanaan, yaitu internal dan eksternal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengusaha UMKM di Desa Wisata, Tingkir Salatiga mempunyai sistem pengelolaan keuangan yang baik dan tren bisnis yang menjanjikan. Mereka berharap bahwa usaha mereka akan terus berkelanjutan hingga anak cucu.

### Prospektus Bisnis

**Tabel 5. Ringkasan Prospektus Bisnis Pengusaha UMKM di Desa Wisata Tingkir Lor, Salatiga**

No	Umur Bisnis	Penjualan kotor	Aset Lancar	Hutang Lancar
1	< 1 tahun	20.000.000 – 60.000.000	40.000.000 - 80.000.000	0
2	1-5 tahun	60.000.000 – 150.000.000	50.000.000 – 200.000.000	30.000.000 – 200.000.000
3	> 5 tahun	150.000.000 – 1.500.000.000	120.000.000 – 700.000.000	100.000.000 - 500.000.000

Tabel 4 tentang ringkasan prospektus bisnis pengusaha UMKM di Desa Wisata, Tingkir Lor, Salatiga menunjukkan bahwa semakin lama umur bisnis UMKM, maka skala perusahaan makin besar. Hal tersebut diindikasikan dengan peningkatan penjualan kotor, Aset Lancar, dan Hutang Lancar. Secara keseluruhan, bisnis konveksi di Desa Wisata Tingkir Lor, Salatiga mempunyai prospek bisnis yang positif.

### Ekonomi Berbagi (*Sharing Economy*)

Para pengusaha UMKM di Desa Wisata, Tingkir Lor Salatiga juga melakukan ekonomi berbagi (*sharing economy*) bagi masyarakat setempat. Mereka melibatkan beberapa rumah tangga untuk melakukan tahapan kegiatan produksi konveksi, seperti : menjahit, mengobras, dan merapikan jahitan. Karyawan UMKM 100% berasal dari masyarakat setempat . Berikut ini adalah tabel yang menyajikan ekonomi berbagi (*sharing economy*) pada 20 pengusaha UMKM di Desa Wisata, Tingkir Lor, Salatiga dari tahun 2016 hingga April 2018 dengan indikator jumlah karyawan.

**Tabel 6. Ekonomi Berbagi di Desa Tingkir Lor Salatiga**

Tahun	Produksi			Penjualan dan Pemasaran	
	Menjahit	Mengobras	Merapikan Jahitan	Tenaga Penjualan dan Pemasaran	Tenaga Administrasi
2016	102	127	195	85	40
2017	104	130	198	86	41
2018	109	135	200	86	41

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk setempat dalam pengelolaan industri konveksi UMKM di Tingkir lor dari tahun ke tahun makin besar. Hal itu menjadi bukti bahwa usaha konveksi makin berkembang dan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Tingkir lor.

Tahap selanjutnya adalah membandingkan aktiva lancar dengan penjualan bruto agar dapat diketahui kebijakan modal kerja yang digunakan, yaitu konservatif, agresif, atau moderat. Berikut ini perhitungan penentuan kebijakan modal kerja pada pengusaha UMKM di Desa Wisata, Salatiga :

**Tabel 7. Perbandingan Aktiva Lancar dengan Penjualan**

No	Pengusaha UMKM	Aktiva Lancar	Penjualan bruto	Perbandingan Aktiva Lancar dan Penjualan bruto	%
1	Ainul Mardiyah	600.000.000	520.850.000	1,15	115,20
2	Adib Mutofa	320.000.000	260.000.000	1,23	123,08
3	Amin Sholikah	720.000.000	530.000.000	1,36	135,85
4	Edi Susilo	35.000.000	60.000.000	0,58	58,33
5	Khaeroni	100.000.000	97.000.000	1,03	103,09
6	Ida Magsum	170.000.000	189.000.000	0,90	89,95
7	Isa	240.000.000	250.000.000	0,96	96,00
8	Munasikah	265.250.000	270.000.000	0,98	98,24
9	Mahfiah Rohmah	93.000.000	90.000.000	1,03	103,33
10	Maksum Afandi	120.500.000	130.000.000	0,93	92,69
11	Mafah	130.200.000	152.000.000	0,86	85,66
12	Munayiroh	710.000.000	700.000.000	1,01	101,43
13	Mut Khasanah	200.800.000	220.000.000	0,91	91,27
14	Mariyani	147.800.000	163.400.000	0,90	90,45
15	Nur Abidin	231.000.500	253.700.000	0,91	91,05
16	Nuraini	272.300.000	251.000.000	1,08	108,49
17	Numan Suntoro	200.300.000	205.200.000	0,98	97,61
18	Nurhadi	889.000.000	1.200.000.000	0,74	74,08
19	Ning Darmaji	672.000.000	1.000.000.000	0,67	67,20
20	Swastika	64.000.000	60.000.000	1,07	106,67

Dari tabel 6 diatas maka dapat diperoleh tiga kelas interval dalam distribusi frekuensi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Panjang kelas (PK)} &= (\text{nilai datum terbesar} - \text{nilai datum terkecil}) / \text{Jumlah kategori} \\ &= (135,85 - 58,33) / 3 \\ &= 25,84 \end{aligned}$$

**Tabel 8. Distribusi Frekuensi Perbandingan antara Aktiva Lancar dengan Penjualan**

Kelas	Nilai prosentase perbandingan Aktiva Lancar dengan Penjualan	Frekuensi	Prosentase
I	58,00 - 84,00	3	15%
II	85,00 - 111,00	14	70%
III	112,00 - 138,00	3	15%
Total		20	100%

Dari tabel distribusi frekuensi perbandingan aktiva lancar dengan penjualan bruto diatas, dapat diketahui bahwa 15% pengusaha UMKM di Desa Wisata, Cengek atau Tingkir Lor, Salatiga menggunakan kebijakan modal kerja konservatif. Pengusaha UMKM tersebut memilih komposisi Aktiva Lancar lebih banyak dari hutang lancar karena sesuai profil resiko pengusaha tersebut yaitu takut mengambil resiko (*risk averse*). Seperti pengungkapan Ibu Swastika (30 tahun) yang merupakan salah satu pengusaha UMKM di Tingkir Lor bahwa sebelum memiliki omset bernilai Milyaran, Swastika tetap berkomitmen menggunakan dana

internal. Menurutnya, hutang pada pihak ke-3 terlalu beresiko karena ada keterikatan untuk menyediakan dana cicilan sementara bisnis rentan dengan ketidakpastian dan bunga bank belum kompetitif jika dibandingkan dengan perolehan margin kotor per barang.

Sementara 70% pengusaha UMKM menggunakan kebijakan modal kerja moderat. Pengusaha UMKM tersebut mempunyai keberanian memadukan sumber pendanaan internal dan eksternal karena memiliki pengalaman mengelola bisnis lebih dari 3 tahun. Sejalan pengalaman mereka, pasar merespon positif eksistensi usaha konveksi yang sudah mereka jalankan. Probabilitas kepastian bisnis menguntungkan lebih besar jika ditinjau dari perputaran Aktiva lancar menjadi penjualan hingga menghasilkan laba dan kembali menjadi Aktiva lancar kembali.

15% dari 20 responden telah menggunakan kebijakan modal kerja agresif. Pengusaha UMKM ini berani mengambil resiko (*risk taker*). Menurut Amin, bahwa resiko yang tinggi akan menghasilkan keuntungan yang tinggi pula. Amin banyak menggunakan dana eksternal karena sejauh ini usahanya berhasil. Dukungan pihak perbankan menjadikan usahanya lebih berkembang.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sunday (2011), Tambunan (2011) dan Roeslani (2016) yaitu bahwa perusahaan skala kecil mempunyai kelemahan finansial karena sangat tergantung dengan fasilitas kredit.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis, telah didapat kesimpulan bahwa 70% dari 20 responden lebih banyak menggunakan kebijakan modal kerja moderat. Sedangkan sisanya 15% lebih memilih konservatif dan 15% memilih agresif. Hal tersebut sesuai dengan profil resiko pengusaha dan prospek bisnis yang dijalankan.

Peneliti merekomendasikan bahwa pengusaha UMKM yang menggunakan kebijakan modal kerja konservatif harus berani menggunakan dana eksternal dengan pengelolaan yang tepat sasaran. Penggunaan dana eksternal akan membantu pengembangan usaha. Hal tersebut dibuktikan dengan para pengusaha UMKM yang menggunakan dana eksternal ternyata mempunyai perkembangan bisnis yang baik dan lebih ekspansif

## DAFTAR PUSTAKA

- Brigham, Eugene F and Daves, Phillip R. 2013. *Intermediate Financial Management*. 12<sup>th</sup> Ed. Thomson ONE
- Brigham, Eugene F and Houston, Joel F. 2014. *Fundamentals of Financial Management*. Concise 8<sup>th</sup> Ed. Thomson ONE
- Horne, James C. Van and John M. Wachowicz, Jr. 2001. *Fundamental of Financial Management*. 13<sup>th</sup> Ed. Singapore: PrenticeHall
- Husnan, Suad dan Pudjiastuti, Enny. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). <http://galeriUMKM.web.id/news/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm>. Diakses, tanggal 10 Desember 2017
- Miswanto. 2012. Kebijakan Dalam Penentuan dan Pendanaan Modal Kerja Perusahaan. *Jurnal Economia*. 8(2).
- Riyanto, Bambang. 2013. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Ed.4, Yogyakarta: BPFE
- Sadiq, Raji. 2017. Impact of Working Capital Management on Small and Medium Enterprises' Performance in Nigeria. *Arabian Journal of Business and Management Review*. 7:285

- Sunday, James Kehinde. 2011. Effective Working Capital Management in Small and Medium Scale Enterprises (SMEs). *International Journal Of Business and Management*. 6 (9).
- Sudjana. 2011. *Metode Statistika*. Ed.6. Bandung: Bandung.Tarsito
- Tambunan, T.T. Hamonangan. 2011. Development of Small and Medium Enterprises in Developing Country-The Indonesia Case. *Journal of Enterprising Communities*. 5(1)
- Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Kanisius IKAPI
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:htcB9zWRTPgJ:www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852/17681/UU20Tahun2008UMKM.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk>. Di akses , tanggal 04 Januari 2018
- Zulhaq, Arifah dan Handayani, Nur. 2017. Pengaruh Modal Kerja dan Kebijakan Pendanaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Farmasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6 (1)

---

# ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

G. Tegoeh Boediono<sup>1\*</sup>, Riana Sitawati<sup>2</sup>, dan Sri Harjanto<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Program Studi Pascasarjana (S2) Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)  
Dharmaputra Semarang, Semarang, Indonesia  
\*Corresponding Email : [tghbdn@yahoo.com](mailto:tghbdn@yahoo.com)

Diterima: Desember 2017; Direvisi: Januari 2018; Dipublikasikan: Maret 2018

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the effect of tax socialization on individual taxpayer compliance with individual taxpayer awareness as a mediating variable. The population in this study is an individual taxpayer who has been registered in the Central Semarang Two Primary Tax Office in 2017, with total of 10,661 taxpayers. Calculation of the number of samples using the Slovin formula, the sample used in this study was as many as 100 questionnaires distributed directly in Central Semarang Two Primary Tax Office with the permission of the official in charge of the Tax Office. Data analysis using Partial Least Square (PLS) approach using WarpPLS 4.0 program. Results of the research indicate that the tax socialization variables can affect the awareness of taxpayers by 50,4% and taxation socialization, and taxpayer awareness can affect taxpayer compliance by 58,5%. Results show that the tax socialization has a positive effect on individual taxpayer awareness, taxation socialization has a positive effect on individual taxpayer compliance, mandatory awareness tax has a positive effect on individual taxpayer compliance, and the awareness of taxpayers mediates the effect of taxation socialization on individual taxpayer compliance.*

**Keywords :** *Taxation Socialization; Personal Taxpayer Awareness; Individual Taxpayer Compliance*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak orang pribadi sebagai variabel mediasi. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua yang berjumlah 10.661 wajib pajak. Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus *slovin*, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 kuesioner yang disebarkan langsung di KPP Pratama Semarang Tengah Dua atas izin pejabat yang berwenang dalam KPP tersebut. Analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan program WarpPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak sebesar 50,4% dan sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 58,5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata kunci :** *Sosialisasi Perpajakan; Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Sistem perpajakan Indonesia pada saat ini salah satunya menganut sistem *self assessment*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dan harus dibayar (Murtopo, 2011).

Fakta di lapangan menunjukkan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan Negara dari sektor pajak belum maksimal. Setiap tahun realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Selain itu, menurut Irawan, Kepala Kanwil I Jawa Tengah, mengatakan bahwa penerimaan pajak pada semester I-2017 ini masih belum tercapai separuh dari target. Dari target penerimaan pajak sebesar Rp 31,6 triliun, sampai bulan Juli 2017 tercapai sekitar 42 persen (Pujangga, 2017). Presentase kepatuhan SPT WP OP kelihatan cenderung menurun dan belum mencapai 100%, hal ini akan berdampak terjadinya penurunan target penerimaan pajak. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Melihat hal tersebut di atas, pemerintah atau dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut penelitian Faizin (2016), Wulandari (2015), Sudrajat dan Ompusunggu (2015), serta Puspita (2016) mengungkapkan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Setyaningrum (2017) dan Winerungan (2013) mengungkapkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu bervariasi, maka peneliti mengajukan penelitian ini ditambah dengan variabel kesadaran wajib pajak sebagai mediasi. Kesadaran Wajib Pajak diusulkan menjadi variabel mediasi merujuk hal-hal tersebut: (1) sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak (Kurniawan, 2014; Wulandari, 2015; Sudrajat dan Ompusunggu, 2015, serta Puspita, 2016), serta (2) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Manuputy dan Sirait, 2016; Faizin, 2016; Setyaningrum, 2017; Setiyani, 2018; Wulandari, 2015; serta Puspita, 2016).

Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Danarsi, 2017). Menurut Manuputy dan Sirait (2016), diperlukan kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak dalam menerapkan sistem perpajakan ini, sebab wajib pajak dituntut untuk mengisi sendiri dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas. Semakin tinggi sosialisasi yang intensif maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak (Kurniawan, 2014). Disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, sehingga rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkat.

Pada latar belakang masalah terungkap adanya masalah kepatuhan SPT WP OP kelihatan cenderung menurun dan belum mencapai 100%, hal ini akan berdampak terjadinya penurunan target penerimaan pajak. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Melihat hal tersebut di atas, pemerintah atau dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Di samping itu hasil penelitian pengaruh sosialisasi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak belum konsisten hasilnya. Atas dasar hal tersebut diusulkan mengurangi gap tersebut melalui kesadaran wajib pajak dengan model mediasi. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut apakah: (1) sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, (2) sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (4) kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Theory of Planned Behaviour***

*Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*noncompliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Tiraada, 2013). *Theory of planned behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku (Basit, 2014).

Perilaku yang dimunculkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu, yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap dan niat terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan dan *control beliefs* menghasilkan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Harinurdin, 2009). Kepatuhan menunaikan kewajiban bagi Wajib pajak Orang Pribadi merupakan perilaku individu. Dalam *theory of planned behavior* (TPB) yang diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1988, menjelaskan bahwa perilaku seseorang sebagai fungsi dari niat (*intention*). Niat (*intention*) seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikapnya terhadap perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) (Handoyono, 2014).

*Theory of Planned Behavior* ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan melaporkan pajak. Adanya niat dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah kesadaran wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga dapat membuat wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan, sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Tiraada, 2013).

Ketidakpatuhan pajak adalah ketidakpatuhan dalam memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik ketidakpatuhan formal maupun ketidakpatuhan material (Hidayat dan Nugroho, 2010). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hidayat dan Nugroho (2010), instrumen ketidakpatuhan pajak dilihat melalui tiga kepatuhan: pertama, kepatuhan pengisian SPT (*filling compliance*), yaitu kepatuhan dalam menyerahkan surat pemberitahuan baik tahunan dan masa dengan tepat waktu. Kedua, kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), yaitu kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak terhutang dengan tepat waktu. Ketiga, kepatuhan

pelaporan (*reporting compliance*), yaitu kepatuhan dalam melaporkan seluruh pajak yang terhutang. Dua kepatuhan pertama merupakan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, sedangkan kepatuhan yang ketiga merupakan kepatuhan secara material.

### Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin, 2016).

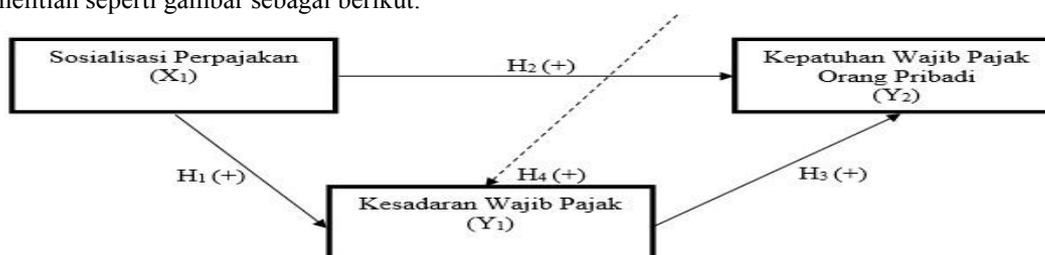
Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Kurniawan (2014). Adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan. Sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan, 2013).

### Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Danarsi, 2017). Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak (Faizin, 2016).

### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu maka disusun model atau kerangka pemikiran penelitian seperti gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

### Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin, 2016). Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat

jumlah (Danarsi, 2017).

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Kurniawan (2014). Semakin intensifnya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan.

Menurut penelitian Kurniawan (2014), Wulandari (2015), serta Puspita (2016) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Sedangkan, penelitian Setyaningrum (2017) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan pemikiran-pemikiran teoritis Kurniawan (2014), Wulandari (2015), serta Puspita (2016) mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak, dapat diturunkan hipotesis penelitian kedua sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi

### **Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Tiraada, 2013). Menggunakan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan, 2013).

Hasil penelitian Faizin (2016), Wulandari (2015), Sudrajat dan Ompusunggu (2015), serta Puspita (2016) mengungkapkan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Setyaningrum (2017) dan Winerungan (2013) mengungkapkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemikiran-pemikiran teoritis Faizin (2016), Wulandari (2015), Sudrajat dan Ompusunggu (2015), serta Puspita (2016) mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat diturunkan hipotesis penelitian keempat sebagai berikut :

H<sub>2</sub>: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak (Faizin, 2016). Hasil penelitian Manuputy dan Sirait (2016), Faizin (2016), Setyaningrum (2017), Setiyani (2018), Wulandari (2015), serta Puspita (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Danarsi (2017) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemikiran-pemikiran teoritis Manuputy dan Sirait (2016), Faizin (2016), Setyaningrum (2017), Setiyani (2018), Wulandari (2015), serta Puspita (2016) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat diturunkan hipotesis penelitian kelima sebagai berikut :

H<sub>3</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Semakin tinggi sosialisasi yang intensif maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak (Kurniawan, 2014). Disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, sehingga rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkat. Hasil penelitian Puspita (2018) menunjukkan bahwa Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri berpengaruh baik secara langsung maupun melalui variabel perantara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri. Sedangkan, penelitian Setyaningrum (2017) dan Wulandari (2015) menunjukkan bahwa Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap hubungan antara Sosialisasi PBB dengan Kepatuhan WP. Berdasarkan pemikiran-pemikiran teoritis Puspita (2018) mengenai kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat diturunkan hipotesis penelitian ketujuh sebagai berikut :

H<sub>4</sub>: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **METODE PENELITIAN**

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke responden yang dituju sebagai sampel penelitian. Menurut Putra (2013), jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah jumlah anggota populasi itu sendiri. Untuk jumlah populasi yang terlalu banyak akan kita ambil untuk dijadikan sampel dengan harapan jumlah sampel yang kita ambil dapat mewakili populasi yang ada. Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan batas kesalahan 10% dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = jumlah populasi

e = persentase kesalahan yang ditolerir dalam pengambilan sampel (e=10%)

Data yang didapat dari hasil penelitian ini adalah data kuantitatif, yang selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan jenisnya. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah salah satu metode penyelesaian *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dalam hal ini lebih tepat dibandingkan dengan teknik-teknik SEM lainnya. PLS *path modeling* secara umum dibentuk dari dua bagian yaitu model *outer* dan *inner* model. Di dalam model persamaan struktural umumnya arah hubungan yang dihipotesiskan antara satu konstruk dengan satu konstruk lainnya mempunyai satu arah kausalitas atau disebut dengan model rekursif (Ghozali dan Latan, 2014). Peneliti menggunakan PLS-SEM dengan menggunakan program WarpPLS 4.0. Diagram jalur dari persamaan struktural yaitu X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> adalah variabel eksogen dan Y<sub>1</sub> serta Y<sub>2</sub> adalah variabel endogen. Berikut

tahapan menguji analisis SEM PLS, diantaranya: (1) menguji validitas konvergen, (2) menguji validitas diskriminan, (3) menguji reliabel konstruk, (4) menguji model fit, dan (5) menguji Hipotesis.

Menurut Ghozali (2016), analisis jalur (*Path Analysis*) merupakan penggunaan analisis jalur untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Model persamaan dalam analisis jalur yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur sebagai berikut :

a.  $Y_1 = \beta_1 X_1 + e_1$  (Jalur I)

b.  $Y_2 = \beta_3 Y_1 + \beta_2 X_1 + e_2$  (Jalur II)

Dimana :

$Y_1$  : Kesadaran Wajib Pajak

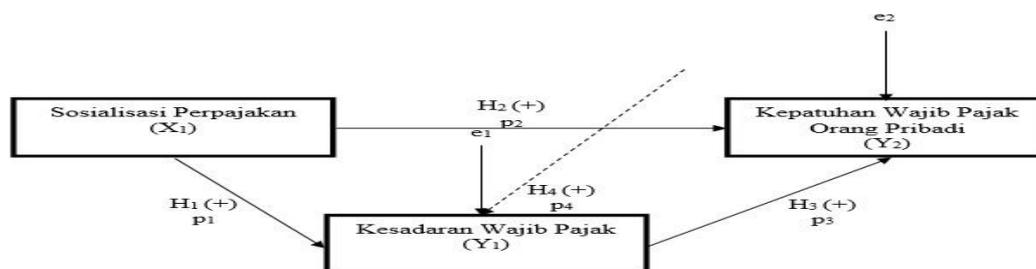
$Y_2$  : Kepatuhan Wajib Pajak

$X_1$  : Sosialisasi Perpajakan

$\beta$  : Koefisiensi Jalur

$e$  : Error/residu

Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas (*exogeneous*) terhadap variabel terikat (*endogeneous*) dapat dijelaskan berdasarkan model diagram jalur sebagai berikut :



Gambar 2. Model Diagram Jalur

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan batas kesalahan 10% dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{10.661}{1 + (10.661 \times (0.1)^2)}$$

$$n = \frac{10.661}{107,61}$$

$$n = 99,071 \text{ responden}$$

(dibulatkan menjadi 100 responden)

Keterangan :

$n$  = ukuran sampel

$N$  = jumlah populasi

$e$  = persentase kesalahan yang ditolerir dalam pengambilan sampel ( $e=10\%$ )

Berdasarkan pertimbangan di atas, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 kuesioner yang disebarakan langsung di Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Semarang Tengah Dua atas izin pejabat yang berwenang dalam KPP

tersebut. Dengan menggunakan 100 kuesioner diharapkan hasil penelitian ini akan menghasilkan *output* yang akurat dan valid.

Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dilakukan untuk menilai reliabilitas dan validitas dari indikator-indikator pembentuk konstruk laten (Ghozali dan Latan, 2014). *Construct validity* atau *factorial validity* digunakan untuk mengukur konsep dari konstruk laten. Pengujian validitas dimaksudkan untuk menguji apakah item/*indicator* yang merepresentasi konstruk laten valid ataukah tidak untuk menjelaskan konstruk laten untuk diukur. *Construct validity* terbagi menjadi dua yaitu :konvergen dan diskriminan (Ghozali dan Latan, 2014).

### Validitas Konvergen

Validitas konvergen bertujuan untuk menguji korelasi antar item/indicator untuk mengukur konstruk. Dengan kata lain validitas konvergen ingin mengkonfirmasi pengukuran konstruk (Ghozali dan Latan, 2014). *Rule of thumb* yang biasanya digunakan untuk menilai *factor loading* yaitu harus lebih besar dari 0.7 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai *loading* faktor antara 0.6 - 0.7 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat *exploratory* (Ghozali dan Latan, 2014). Selain itu direkomendasikan nilai *P-value* harus < 0,05.

**Tabel 1. Validitas Konvergen**

	Y1	Y2	X1	Type (as defined)	SE	P value
Y11	<b>(0.689)</b>	-0.076	-0.376	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
Y12	<b>(0.775)</b>	0.126	-0.309	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
Y13	<b>(0.796)</b>	-0.318	0.241	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
Y14	<b>(0.791)</b>	-0.207	-0.031	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
Y15	<b>(0.714)</b>	0.183	0.065	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
Y16	<b>(0.678)</b>	0.355	0.419	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
Y21	0.040	<b>(0.742)</b>	0.091	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
Y22	0.039	<b>(0.867)</b>	-0.021	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
Y23	0.048	<b>(0.825)</b>	-0.241	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
Y24	0.007	<b>(0.788)</b>	0.135	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
Y25	-0.170	<b>(0.818)</b>	0.302	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
Y26	0.048	<b>(0.747)</b>	0.003	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
Y27	-0.006	<b>(0.873)</b>	-0.236	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
X11	-0.177	-0.097	<b>(0.876)</b>	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
X12	-0.112	-0.078	<b>(0.885)</b>	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
X13	-0.042	0.000	<b>(0.875)</b>	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
X14	-0.031	-0.033	<b>(0.886)</b>	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
X15	0.037	-0.082	<b>(0.888)</b>	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
X16	-0.046	-0.033	<b>(0.932)</b>	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
X17	0.096	-0.038	<b>(0.929)</b>	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
X18	-0.036	0.103	<b>(0.921)</b>	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
X19	0.003	0.073	<b>(0.921)</b>	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
X110	-0.017	0.042	<b>(0.933)</b>	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>
X111	0.061	0.084	<b>(0.889)</b>	Reflective	0.076	< <b>0.001</b>

	Y1	Y2	X1	Type (as defined)	SE	P value
<b>X112</b>	-0.024	0.064	<b>(0.906)</b>	Reflective	0.076	<b>&lt;0.001</b>
<b>X113</b>	0.072	0.050	<b>(0.935)</b>	Reflective	0.076	<b>&lt;0.001</b>
<b>X114</b>	0.129	-0.057	<b>(0.926)</b>	Reflective	0.076	<b>&lt;0.001</b>
<b>X115</b>	-0.019	0.052	<b>(0.933)</b>	Reflective	0.076	<b>&lt;0.001</b>
<b>X116</b>	0.092	-0.058	<b>(0.928)</b>	Reflective	0.076	<b>&lt;0.001</b>

Berdasarkan hasil *output* olah data pada tabel 1 menyatakan bahwa nilai *factor loading* > 0,6 untuk semua indikator yang mengukur besarnya variabel kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan, maka dapat disimpulkan untuk semua butir jawaban tersebut sudah valid dan dapat digunakan untuk penelitian.

### Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan bertujuan untuk menguji item/indikator dari dua konstruk yang seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Ghozali dan Latan, 2014). Kriteria yang digunakan adalah: Akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) > korelasi antar konstruk laten (Ghozali dan Latan, 2014).

**Tabel 2. Validitas Diskriminan**

	Y1	Y2	X1
<b>Y1</b>	<b>(0.742)</b>	0.710	0.687
<b>Y2</b>	0.710	<b>(0.810)</b>	0.623
<b>X1</b>	0.687	0.623	<b>(0.911)</b>

Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui bahwa nilai Akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) variabel moral kesadaran wajib pajak sebesar 0,742 > korelasi antar konstruk laten, nilai akar kuadrat AVE variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,810 > korelasi antar konstruk laten, dan nilai akar kuadrat AVE variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,911 > korelasi antar konstruk laten. Maka dapat disimpulkan untuk semua indikator tersebut sudah valid dan dapat digunakan untuk penelitian.

### Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan item/*indicator* dalam mengukur konstruk. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program WarpPLS 4.0, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan melihat nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*. Nilai *Composite Reliability* > 0,7 dan *Cronbach Alpha* > 0,7 (Ghozali dan Latan, 2014).

**Tabel 3. Reliabilitas**

	Y1	Y2	X1
R-Squared	0.509	0.593	
Adj. R-Squared	0.504	0.585	
<b>Composite reliab.</b>	<b>0.880</b>	<b>0.930</b>	<b>0.987</b>
<b>Cronbach's alpha</b>	<b>0.836</b>	<b>0.912</b>	<b>0.986</b>
Avg. Var. Extrac.	0.551	0.656	0.829
Full Collin. VIF	2.512	2.170	2.036
Q-squared	0.507	0.604	

Berdasarkan hasil *output* olah data 3 di atas, diketahui bahwa Nilai *Composite Reliability* variabel kesadaran wajib pajak sebesar  $0,880 > 0,7$ , kepatuhan wajib pajak sebesar  $0,930 > 0,7$ , dan sosialisasi perpajakan sebesar  $0,987 > 0,7$ . Serta Nilai *Cronbach Alpha* variabel kesadaran wajib pajak sebesar  $0,836 > 0,7$ , kepatuhan wajib pajak sebesar  $0,912 > 0,7$ , dan sosialisasi perpajakan sebesar  $0,986 > 0,7$ . Maka dapat disimpulkan untuk semua indikator tersebut sudah reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian.

### Model Fit

*Inner model* menunjukkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk berdasarkan pada *substantive theory* (Ghozali dan Latan, 2014). Program WarpPLS 4.0 mempunyai 4 (empat) ukuran fit model antara lain *average path coefficient* (APC), *average R-squared* (ARS), *average adjusted R-squared* (AARS), dan *average full collinearity VIF* (AFVIF).

Program WarpPLS 4.0 mempunyai 4 (empat) ukuran fit model antara lain *average path coefficient* (APC), *average R-squared* (ARS), *average adjusted R-squared* (AARS), dan *average full collinearity VIF* (AFVIF) (Sholihin dan Ratmono, 2013). Nilai *cut-off P-value* untuk APC, ARS dan AARS yang direkomendasikan sebagai model fit adalah  $\leq 0,05$  dengan level signifikansi yang digunakan adalah 5% (Ghozali dan Latan, 2014).

Idealnya, nilai AFVIF yang direkomendasikan untuk kedua ukuran tersebut harus  $\leq 3,3$  dengan asumsi kebanyakan konstruk/variabel di dalam model diukur dengan dua atau lebih indikator (Ghozali dan Latan, 2014).

```

Model fit and quality indices
-----
Average path coefficient (APC)=0.616, P<0.001
Average R-squared (ARS)=0.561, P<0.001
Average adjusted R-squared (AARS)=0.544, P<0.001
Average block VIF (AVIF)=1.818, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=2.239, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.611, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36
Simpson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if >= 0.7, ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if >= 0.9, ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if >= 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if >= 0.7

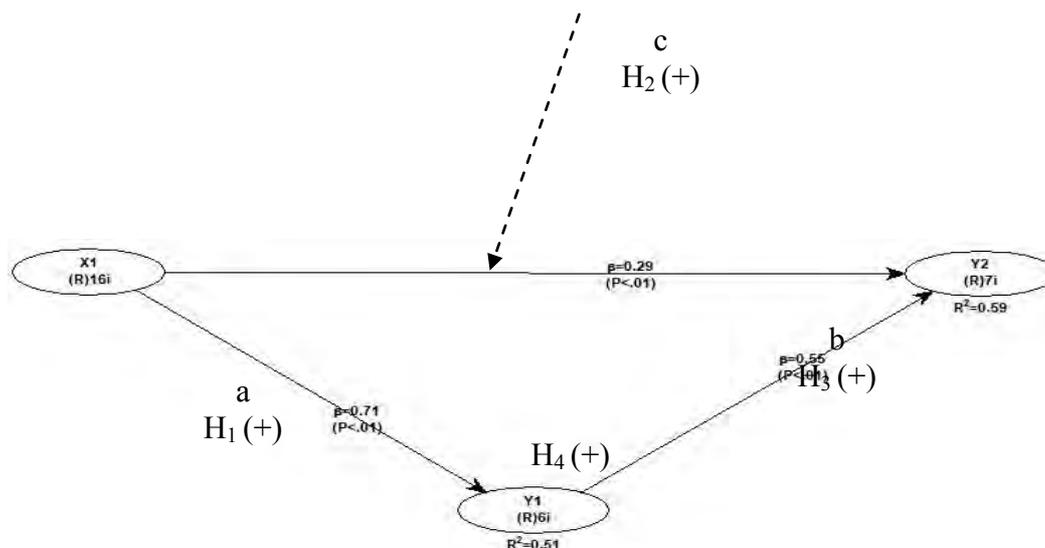
General model elements
-----
Outer model analysis algorithm: PLS regression
Default inner model analysis algorithm: Warp3
Multiple inner model analysis algorithms used? No
Resampling method used in the analysis: Stable
Number of data resamples used: 100
Number of cases (rows) in model data: 100
Number of latent variables in model: 3
Number of indicators used in model: 29
Number of iterations to obtain estimates: 5
Range restriction variable type: None
Range restriction variable min value: 0.000
Range restriction variable max value: 0.000
Only ranked data used in analysis? No
    
```

Gambar 3. Model Fit

Berdasarkan gambar 3 di atas, nilai *P-value* untuk APC sebesar  $P<0,001$  lebih kecil dari 0,05, ARS sebesar  $P<0,001$  lebih kecil dari 0,05 dan AARS sebesar  $P<0,001$  lebih kecil dari 0,05, maka model penelitian ini fit untuk dapat mengukur kualitas model. Nilai AFVIF sebesar  $2,239 < 3,3$ , maka AFVIF memenuhi kriteria ideal fit model.

### Menguji Hipotesis

Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian, maka rancangan uji hipotesis yang dapat dibuat merupakan rancangan uji hipotesis dalam penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan penelitian. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan sebesar  $(\alpha) = 5\% = 0,05$ . Besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk menguji  $H_1$ ,  $H_2$ , dan  $H_3$  dapat dijelaskan berdasarkan model diagram jalur sebagai berikut :



Gambar 4. Model Diagram Jalur

Tabel 4. *Path Coefficients* H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub>, dan H<sub>3</sub>

	Y1	Y2	X1
Y1			0.713
Y2	0.548		0.286
X1			

Tabel 5. *P Values* H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub>, dan H<sub>3</sub>

	Y1	Y2	X1
Y1			<0.001
Y2	<0.001		<0.001
X1			

Nilai signifikansi variabel sosialisasi perpajakan sebesar <0,001 lebih kecil dari 0,05, maka variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tabel 4 di atas, analisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap variabel kesadaran wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki hubungan positif terhadap variabel kesadaran wajib pajak orang pribadi yang ditunjukkan oleh  $\beta_1$  yang bernilai positif sebesar 0,713. Berdasarkan hasil tersebut H<sub>1</sub> diterima yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Disimpulkan bahwa semakin intensifnya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan.

Nilai *p value* variabel sosialisasi terhadap kepatuhan WP OP sebesar <0,001 lebih kecil dari 0,05, maka variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4 kolom *path coefficients*, analisis pengaruh variabel sosialisasi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki hubungan positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh  $\beta_2$  yang bernilai positif sebesar 0,286. Berdasarkan hasil tersebut H<sub>2</sub> diterima yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Disimpulkan bahwa menggunakan sosialisasi ini

masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan, 2013).

Nilai signifikansi variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar <0,001 lebih kecil dari 0,05, maka variabel kesadaran WP OP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4 tersebut, hasil analisis pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh  $\beta_3$  yang bernilai positif sebesar 0,548. Berdasarkan hasil tersebut  $H_3$  diterima yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Disimpulkan bahwa tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak (Faizin, 2016).

**Tabel 6. Efek Mediasi (Indirect and Total Effects)**  
**P values of indirect effects for paths with 2 segments**

	Y1	Y2	X1
Y1			
Y2			<0.001
X1			

Kolom *P values of indirect effects for paths with 2 segments* pada tabel 6 di atas menunjukkan nilai signifikansi sosialisasi perpajakan sebesar <0,001 lebih kecil dari 0,05, maka kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya *variance indirect effect* penulis dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus *Variance Accounted For* (VAF). Menurut Ghozali dan Latan (2014), VAF dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$a = \beta_1 = 0,713$$

$$b = \beta_3 = 0,548$$

$$c = \beta_2 = 0,286$$

$$\begin{aligned} VAF &= \frac{a \times b}{(a \times b) + c} \times 100\% \\ &= \frac{0,713 \times 0,548}{(0,713 \times 0,548) + 0,286} \times 100\% \\ &= \frac{0,390724}{0,676724} \times 100\% \\ &= 57,74\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, menunjukkan *variance indirect effect* kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 57,74%. Hasil analisis yang dilakukan memberikan dukungan terhadap

hipotesis keempat yang diajukan yaitu kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $H_4$  diterima). Disimpulkan bahwa semakin tinggi sosialisasi yang intensif maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak (Kurniawan, 2014). Disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, sehingga rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkat.

### **Pembahasan**

Hasil uji hipotesis pertama, menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi ( $H_1$  diterima). Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Kurniawan, 2014). Semakin intensifnya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan sampel 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Tengah Dua menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Kurniawan (2014) dengan sampel 100 WP OP yang telah disensus pajak yang terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi, Wulandari (2015) dengan sampel 100 wajib pajak orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan mempunyai kegiatan usaha di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, serta Puspita (2016) dengan sampel 100 wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di bawah pengawasan Dispenda Kota Kediri tahun 2015.

Hasil uji hipotesis kedua, menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $H_2$  diterima). Menggunakan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan, 2013). Semakin meningkatnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah maka akan meningkatkan rasa kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar tepat waktu dan melaporkan dengan benar.

Hasil penelitian Faizin (2016) dengan sampel 102 KK di RT 4 Desa Mojaranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Wulandari (2015) dengan sampel 100 wajib pajak orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan mempunyai kegiatan usaha di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Sudrajat dan Ompusunggu (2015) dengan 400 sampel Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) yang ada di Kanwil DJP Jakarta Selatan, serta Puspita (2016) dengan 100 wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di bawah pengawasan Dispenda Kota Kediri tahun 2015 sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan sampel 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Tengah Dua, yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji hipotesis ketiga, menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $H_3$  diterima). Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka

kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak (Faizin, 2016). Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh untuk menjalankan laporan pajak dengan benar, tepat waktu dan jujur.

Hasil penelitian Manuputy dan Sirait (2016) dengan sampel 100 responden di KPP Pratama Jakarta Penjaringan di daerah Jakarta Barat, Faizin (2016) dengan sampel 102 KK di RT 4 Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Setyaningrum (2017) dengan sampel 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, Setiyani (2018) dengan sampel 150 wajib pajak orang pribadi yang ada di kota Semarang dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kota Semarang, Wulandari (2015) dengan sampel 100 wajib pajak orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan mempunyai kegiatan usaha di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, serta Puspita (2016) dengan sampel 100 wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di bawah pengawasan Dispenda Kota Kediri tahun 2015, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan sampel 100 wahib pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Dua yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji hipotesis keempat kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $H_4$  diterima). Semakin tinggi sosialisasi yang intensif maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak (Kurniawan, 2014). Disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, sehingga rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkat. Hasil penelitian Puspita (2018) pada Dispenda Kota Kediri tahun 2015 sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis di KPP Pratama Semarang Tengah Dua yang menunjukkan bahwa Sosialisasi berpengaruh baik secara langsung maupun melalui variabel perantara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri.

## SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis penelitian dan pembahasan pada bagian BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut: Nilai signifikansi variabel sosialisasi perpajakan sebesar  $<0,001$  lebih kecil dari  $0,05$  dan  $\beta_1$  yang bernilai positif sebesar  $0,713$ . Berdasarkan hasil tersebut  $H_1$  diterima yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Nilai  $p$  value variabel sosialisasi terhadap kepatuhan WP OP sebesar  $<0,001$  lebih kecil dari  $0,05$  dan  $\beta_2$  yang bernilai positif sebesar  $0,286$ . Berdasarkan hasil tersebut  $H_2$  diterima yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  $<0,001$  lebih kecil dari  $0,05$  dan  $\beta_3$  yang bernilai positif sebesar  $0,548$ . Berdasarkan hasil tersebut  $H_3$  diterima yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi sosialisasi perpajakan sebesar  $<0,001$  lebih kecil dari  $0,05$  dan *variance indirect effect* kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  $57,74\%$ . Hasil analisis yang dilakukan memberikan dukungan terhadap hipotesis keempat yang diajukan yaitu kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $H_4$  diterima). Variabel sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak sebesar  $50,4\%$  dan sisanya  $49,6\%$  dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model jalur ini. Menurut penelitian

terdahulu, variabel lain yang dimungkinkan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah motivasi wajib pajak, kualitas pelayanan, serta persepsi wajib pajak. Variabel sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 58,5% dan sisanya 41,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model jalur ini. Variabel lain yang dimungkinkan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi wajib pajak, pembelajaran peraturan perpajakan, tarif pajak, motivasi wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan pajak

## DAFTAR PUSTAKA

- Basit, A. 2014. Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Tekun*. V (01): 23- 48
- Danarsi, Siti Nurlaela, dan Hendro Subroto. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. 18 (01) :45-55
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Undang-Undang KUP Dan Peraturan Pelaksanaannya”. Jakarta Selatan : Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
- Faizin, M. R., Kertahadi, dan Ika Ruhana. 2016. Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 9(1): 1-9
- Ghozali, Imam.. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam dan Hengky Latan. 2014. *Partial Least Squares Konsep, Metode, dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 4.0*. Second Edition. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Handoyono, R. 2014. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Semarang Candisari. *Akun-T*. 2 (2) :215-240
- Harinurdin, E. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Bisnis & Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. 16 (2):96-104
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok -Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Hidayat, W., dan Argo Adhi Nugroho. 2010. Studi Empiris *Theory Of Planned Behavior* Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. 12 (2):82-93
- Kurniawan, H., Srikandi Kumadji, dan Fransisca Yaningwati. 2014. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Banyuwangi). *Jurnal Perpajakan*. 3(1): 1-8
- Manuputty, I.G., dan Swanto Sirait. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan *Self Assesment System* Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan. 1(2) :44-58
- Murtini, dan Alfi Hanafi. 2015. Pengaruh Pengetahuan Dan Pembelajaran Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Umkm Di Kota Pekalongan). *Jurnal Litbang*.9: 88-99

- Murtopo, Purno, Sjafardamsah, dan Tugiman Binsarjono. 2011. *Perpajakan-Pendekatan Sertifikasi A-B-C Edisi Pertama*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Pujangga, Raka F. 2017. Duh, Penerimaan Pajak di DJP I Jawa Tengah Baru 42 Persen” Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Laporan Kinerja 2016”. Diakses pada tanggal 14 November 2017. <http://jateng.tribunnews.com/2017/08/11/duh-penerimaan-pajak-di-djp-i-jawa-tengah-baru-42-persen>
- Purba, B.P. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Media Akuntansi Perpajakan*. 1 (2): 29-43
- Puspita, Erna. 2016. Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*. 1 (1):1-8
- Putra, R., Andri Suprayogi, dan Utomo Kahar. 2013. Aplikasi SIG Untuk Penentuan Daerah Quick Count Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus : Pemilihan Walikota Cirebon 2013, Jawa Barat). *Jurnal Geodesi Undip*. 2 (4): 1-12
- Setiyani, NM, Rita Andini, dan Abrar Oemar. 2018. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal of Accounting*. 1-18
- Setyaningrum, T.A. 2017. Pengaruh Sosialisasi Dengan Mediasi Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Pekalongan. *Dokumen Karya Ilmiah Skripsi*. Prodi Akuntansi - S1. Udinus. Feb 2017
- Sudrajat, Ajat, dan Arles Parulian Ompusunggu. 2015. Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* .2 (2):193-202
- Tiraada, T.A.M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. 1(3) :999-1008
- Winerungan, O.L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal EMBA*.1(3). September 2013: 960-970
- Wulandari, Tuti. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jom FEKON*. 2 (2): 1-15



## PENDAHULUAN

Setiap perusahaan akan selalu berusaha mencapai keadaan yang lebih baik dalam menjalankan bisnis mereka. Kondisi yang lebih baik dapat dicapai apabila perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dimana pada akhirnya perusahaan dapat melakukan aktivitas usaha sesuai visi, misi dan tujuan yang dimiliki perusahaan. Tujuan utama dari perusahaan sudah *go public* atau yang sudah terdaftar di BEI, yaitu untuk menghasilkan laba guna meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Dengan semakin baiknya nilai perusahaan, maka perusahaan tersebut akan dipandang semakin bernilai oleh para calon investor (Gultom, 2013).

Nilai perusahaan yang meningkat akan mempengaruhi nilai pemegang saham apabila peningkatan ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham. Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satunya adalah dengan harga pasar saham perusahaan karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor secara keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki. Nilai perusahaan sendiri dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, antara lain kinerja keuangan yang diukur melalui rasio likuiditas dan profitabilitas. Selain itu, struktur modal perusahaan dan ukuran perusahaan juga merupakan variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan.

Perusahaan dengan struktur modal yang tidak baik dan hutang yang sangat besar akan memberikan beban berat kepada perusahaan sehingga perlu diusahakan suatu keseimbangan yang optimal dalam menggunakan kedua sumber tersebut sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Semakin tingginya modal suatu perusahaan yang berasal dari modal sendiri, baik investor maupun pemilik mengindikasikan rendahnya hutang yang dimiliki, sehingga cenderung akan memberikan insentif yang lebih besar kepada pemiliknya, yang akhirnya dapat mendorong tingginya pembayaran hasil investasi, di mana pada ujungnya akan meningkatkan nilai perusahaan dari naiknya harga saham (Gultom, 2013).

Berdasarkan teori struktur modal, apabila posisi struktur modal berada di atas target struktur modal optimalnya, maka setiap penambahan hutang akan menurunkan nilai perusahaan. Penentuan target struktur modal optimal adalah salah satu dari tugas utama manajemen perusahaan. Struktur modal adalah proporsi pendanaan dengan hutang (*debt financing*) perusahaan. Dengan demikian, hutang adalah unsur dari struktur modal perusahaan. Struktur modal merupakan kunci perbaikan produktivitas dan kinerja perusahaan. Teori struktur modal menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan (*financial policy*) perusahaan dalam menentukan struktur modal (bauran antara hutang dan ekuitas) bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (*value of the firm*).

Ukuran perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari aset yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar (Rahayu, 2018).

Profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Ukuran profitabilitas perusahaan dapat berbagai macam seperti : laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Robert (1997) mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini merupakan rasio yang terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada (Robert, 1997).

Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi mengindikasikan kesempatan bertumbuh perusahaan cenderung tinggi. Semakin likuid perusahaan, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan kreditur dalam memberikan dananya, sehingga dapat

meningkatkan nilai perusahaan di mata kreditur maupun pada calon investor. Ukuran perusahaan dinilai mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga perusahaan cenderung memiliki sumber dana yang lebih banyak guna menunjang kegiatan operasionalnya. Sehingga perusahaan dapat lebih banyak mendapatkan peluang memperoleh laba yang lebih tinggi. Dengan semakin tingginya perolehan laba akan meningkatkan harga saham perusahaan yang pada ujungnya akan meningkatkan nilai perusahaan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Nilai Perusahaan

Nilai Perusahaan Husnan (2000) menyatakan nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi pendanaan dan manajemen asset Susanti (2010) dalam Mahendra (2011). Nilai perusahaan (Tobins q) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Tobins\ q = \frac{Nilai\ Pasar\ Saham\ Biasa + Nilai\ Buku\ Hutang}{Total\ Aset}$$

### Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Likuiditas diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Perusahaan yang memiliki likuiditas sehat paling tidak memiliki rasio lancar sebesar 100%. Ukuran likuiditas perusahaan yang lebih menggambarkan tingkat likuiditas perusahaan ditunjukkan dengan rasio kas (kas terhadap kewajiban lancar).

*Current ratio* merupakan salah satu ukuran dari likuiditas yang merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui sejumlah kas, setara kas, seperti giro atau simpanan lain di bank yang dapat ditarik setiap saat yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi *current ratio* menunjukkan kemampuan kas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi likuiditas perusahaan, semakin banyak dana tersedia bagi perusahaan untuk membayar deviden, membiayai operasi dan investasinya.

Rumus :

$$CR = \frac{Aktiva\ Lancar}{Hutang\ Lancar}$$

### Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Husnan, 2001). Profitabilitas ini memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (*profitable*). Tanpa adanya keuntungan (profit), maka akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Munawir (2010)

mengemukakan bahwa “Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif, dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut”. Rumus yang dapat digunakan adalah:

$$ROA = \frac{Laba}{Total Asset}$$

### Struktur Modal

Struktur modal adalah proporsi pendanaan dengan hutang (*debt financing*) perusahaan, yaitu rasio *leverage* perusahaan. Dengan demikian, hutang adalah unsur dari struktur modal perusahaan. Struktur modal merupakan kunci perbaikan produktivitas dan kinerja perusahaan. Teori struktur modal menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan (*financial policy*) perusahaan dalam menentukan struktur modal (bauran antara hutang dan ekuitas) bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (*value of the firm*). *Debt to Equity Ratio (DER)* dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat diketahui tingkat risiko tak terbayarkan suatu hutang. *Debt to Equity Ratio (DER)* juga menunjukkan tingkat hutang perusahaan, perusahaan dengan hutang yang besar mempunyai biaya hutang yang besar pula. Hal tersebut menjadi beban bagi perusahaan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor.

Menurut Brigham dan Houston (2006) *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan perbandingan antara total hutang dengan total modal sendiri (ekuitas). Makin tinggi *Debt to Equity Ratio* maka akan menunjukkan semakin besarnya modal pinjaman yang digunakan untuk pembiayaan aktiva perusahaan. Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio*, maka semakin berisiko bagi perusahaan (kemungkinan perusahaan tidak dapat membayar semua hutangnya). Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* sebagai berikut:

$$DER = \frac{Total Hutang}{Modal Sendiri}$$

### Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jika perusahaan memiliki total asset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan asset yang ada diperusahaan tersebut. Jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan (Suharli, 2006). Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva dan jumlah penjualan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan, total aktiva yang dimiliki, atau total penjualan yang diperolehnya. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan Total Asset.

### Hipotesis

Merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan dua variabel atau lebih yang memiliki keterikatan secara konsep atau teoritis yang baru dilakukan pengujian secara empiris (Indriantoro dan Supomo, 2014).

Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diajukan adalah :

- H<sub>1</sub>: *Current Ratio* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan  
 H<sub>2</sub>: *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan  
 H<sub>3</sub>: *Size* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan  
 H<sub>4</sub>: *Return On Asset* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu perusahaan yang memiliki syarat-syarat tertentu yaitu menerbitkan laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut dan *listed* di BEI selama periode 2015-2017.

### METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik. Untuk mengetahui pengaruh *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, Ukuran perusahaan dan *Return On Asset* terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik yaitu uji Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi serta lolos uji Normalitas Data.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Untuk menginterpretasikan hasil statistik deskriptif dari struktur modal, likuiditas, ukuran perusahaan, profitabilitas dan nilai perusahaan dapat dilihat dari Tabel berikut :

**Tabel 1. Deskriptif Data**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviasi
Tobins Q	69	0,34	12,9624201	2,33	2,736
CR	69	1,11	532,5	140,03	156,943
DER	69	-1,7	288,85	37,54	52,398
SIZE	69	42508	2.E8	1.80E7	3.922E7
ROA	69	-3,16	30	8,19	8,301

Dari output dapat dilihat bahwa sebagian besar variabel memiliki nilai standar deviasi yang lebih tinggi daripada rata-rata kecuali pada variabel ROA, namun demikian pada uji normalitas dapat dilihat bahwa residual data telah terdistribusi normal (Tabel 2).

**Tabel 2. Normalitas Data**

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	1.132
Asymp. Sig. (2-tailed)	.154

Dari output dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,154 diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data telah terdistribusi normal.

**Asumsi Klasik**  
**Multikolinearitas**

**Tabel 3. Uji Multikolinearitas**

	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>	<b>Keterangan</b>
CR	.927	1.079	Tidak ada multikolinearitas
DER	.878	1.138	Tidak ada multikolinearitas
LN_TA	.974	1.026	Tidak ada multikolinearitas
ROA	.893	1.120	Tidak ada multikolinearitas

Dari output dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas.

**Autokorelasi**

Dari output didapat nilai Durbin Watson sebesar 2,277 berada di daerah ragu-ragu, karena nilai du sebesar 1,735. Sehingga digunakan uji Run untuk melihat ada tidaknya autokorelasi.

**Tabel 4. Uji Run**

	<b>Unstandardized Residual</b>
Z	1,821
Asymp. Sig (2 Tailed)	0,069

Dari output dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,069 yang berarti bahwa model bebas dari autokorelasi.

**Heteroskedastisitas**

**Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas**

<b>Variabel</b>	<b>t</b>	<b>Sig</b>	<b>Keterangan</b>
Lcr	1.062	.293	Bebas Heteroskedastisitas
LDER	-1.033	.306	Bebas Heteroskedastisitas
LSIZE	1.825	.073	Bebas Heteroskedastisitas
LROA	1.479	.145	Bebas Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji Park, dari output dapat dilihat bahwa nilai signifikansi seluruh variabel independen bernilai diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari heteroskedastisitas.

**ANOVA**

**Tabel 6. ANOVA**

	<b>Sum of Squares</b>	<b>df</b>	<b>Mean Square</b>	<b>F</b>	<b>Sig.</b>
Regression	279.861	4	69.965	19.541	.000 <sup>a</sup>
Residual	229.151	64	3.580		
Total	509.012	68			

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa model memiliki nilai F hitung sebesar 19,541 dan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel CR, DER, Size dan ROA berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 7. Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.741 <sup>a</sup>	.550	.522	1.892.218

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat nilai Adjusted R square sebesar 0,522 yang berarti bahwa sebesar 52,2% variasi variabel nilai perusahaan mampu dijelaskan variasi variabel independen yaitu CR, DER, Size dan ROA sedangkan sisanya sebesar 47,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

### Analisis Regresi

Setelah lolos dari uji asumsi klasik maka dari output didapat persamaan sebagai berikut :

**Tabel 8. Hasil Regresi dan Uji Hipotesis**

Variabel	B	Std Error	t	Sign
(Constant)	.573	.449	1.277	.206
CR	-.002	.002	-1.616	.111
DER	.001	.005	.141	.889
Size	3,35E-06	.000	.566	.574
ROA	.247	.029	8.426	.000

Persamaan :

$$\text{Nilai Perusahaan} = 0,573 - 0,002 \text{ CR} + 0,001 \text{ DER} + 3,35\text{E-}06 \text{ Size} + 0,247 \text{ ROA}$$

1. Konstanta 0,573 dapat diartikan bahwa apabila CR, DER, Size dan ROA tetap atau tidak ada perubahan maka nilai perusahaan bernilai positif 0,573.
2. Koefisien CR -0,002 dapat diartikan bila CR naik 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap maka Nilai perusahaan akan turun sebesar 0,002.
3. Koefisien DER sebesar 0,001 dapat diartikan bila DER naik 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 0,001.
4. Koefisien Size sebesar 3,35E-06 dapat diartikan bila Size naik 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 3,35E-06.
5. Koefisien ROA sebesar 0,247 dapat diartikan bila ROA naik 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 0,247

### Uji Hipotesis

1. Hipotesis 1 *Current Ratio* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

Dari tabel8 dapat diketahui bahwa nilai koefisien sebesar -0,002 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,111. Karena nilai signifikansi diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 ditolak. Pada dasarnya likuiditas merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang mana tentu saja dapat meningkatkan nilai perusahaan karena nilai hutang yang sedikit namun nilai likuiditas yang tinggi juga

menunjukkan banyak dana perusahaan yang menganggur yang pada akhirnya mengurangi kemampuan laba perusahaan.

2. Hipotesis 2 *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai koefisien sebesar 0,001 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,889. Karena nilai signifikansi diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 ditolak. Pada dasarnya struktur modal yang meningkat cenderung akan meningkatkan nilai perusahaan karena menunjukkan tingkat modal perusahaan yang tinggi dalam meningkatkan keuntungan. Hal ini dikarenakan struktur modal perusahaan merupakan pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham. Sehingga, struktur modal suatu perusahaan hanya merupakan sebagian dari struktur keuangannya

3. Hipotesis 3 *Size* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai koefisien sebesar 3,35E-06 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,574. Karena nilai signifikansi diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 ditolak. Pada dasarnya ukuran perusahaan menunjukkan total aset perusahaan, jika nilai ukuran perusahaan tinggi maka semakin besar aktiva yang bisa dijadikan jaminan perusahaan untuk memperoleh hutang maka ada modal perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan laba perusahaan yang otomatis meningkatkan nilai perusahaan.

4. Hipotesis 4 *Profitabilitas* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai koefisien sebesar 0,247 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 diterima. Pada dasarnya profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba bersih dari penjualan bersih nya dan juga dapat mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan meminimalkan beban perusahaan dan memaksimalkan laba perusahaan. Dan hal ini lah yang dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga investor juga lebih tertarik untuk menanam saham pada perusahaan tersebut.

## SIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah :

1. Secara simultan keempat variabel independen yaitu CR, DER, Size dan ROA berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
2. Secara Parsial variabel ROA berpengaruh signifikan terhadap Nilai perusahaan, sedangkan CR, DER dan Size tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
3. Regresi memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,522 atau sebesar 52,2% variasi variabel nilai perusahaan mampu jelaskan variasi variabel CE, DER, Size dan ROA sedangkan sisanya dijelaskan variabel lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ang, Robert. 2005. *Buku Pintar : Pasar Modal Indonesia*. Mediasoft Indonesia.
- Irayanti, Desi dan Tumbel, AL. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan Pada Industri Makanan dan Minuman di BEI. *Jurnal EMBA*. 2 (3) : 1473-1482.
- Rahayu, Maryati dan Sari, Bida. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan. *Ikraith-Humaniora*. 2(2).
- Gultom, Robinhot dkk. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*. 3 (1)
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta.

Amalia Nur Chasanah : Pengaruh Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2017

- Brigham, EF dan Houston, 2006. *Dasar - Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Husnan, Suad. 2000. *Corporate Governance di Indonesia : Pengamatan terhadap Sektor Corporate dan Keuangan*. Yogyakarta.
- Husnan, Suad. 2001. *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan*. BPFE. Yogyakarta.
- Suharli, M. 2006. Studi Empiris terhadap Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan pada Perusahaan Go Public di Indonesia. *Jurnal Maksi VI (1)*
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics*. Mc Grawhill. New York.
- Munawir. 2010. *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*. Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Mahendra. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderating) Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.



## PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan kelanjutan penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap kinerja perusahaan. Tema penelitian yang membahas pajak merupakan beban bagi perusahaan telah menjadi subjek penelitian yang luas. Dengan demikian, perencanaan pajak untuk mengurangi beban tersebut melalui penghindaran pajak diharapkan memiliki dampak signifikan pada perusahaan. Sementara konsekuensi pajak merupakan faktor pendorong dalam banyak keputusan perusahaan, tindakan manajerial yang dirancang semata-mata untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan dianggap sebagai fitur aktivitas perusahaan yang semakin penting. Penghindaran pajak dapat dimotivasi oleh sejumlah faktor namun konsekuensi dari tindakan tersebut dapat menjadi positif atau negatif (Desai & Dharmapala, 2009). Oleh karena itu, penting untuk memeriksa bagaimana kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh tingkat penghindaran pajak.

Menurut Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2008) dan Hanlon dan Heitzman (2010), penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dapat secara eksplisit mengurangi beban pajak perusahaan, tercermin dalam tarif pajak efektifnya, dan mencakup pengurangan pajak yang sepenuhnya legal dan yang menempati daerah abu-abu (Dyreng, et al., 2008). Meskipun ada penghematan pajak yang signifikan yang dihasilkan oleh kegiatan penghindaran pajak (Robinson, dan Schmidt, 2012), terdapat hasil yang variasi mengenai implikasi penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan (Koester, 2011), terutama karena dampak ini bervariasi dalam penelitian *cross-section*. Misalnya, kenaikan kinerja perusahaan mungkin diimbangi dengan meningkatnya peluang *rent extraction* terkait dengan penghindaran pajak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhir-akhir ini menunjukkan banyak minat pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena kompleksnya operasi mereka dan kecenderungan mereka untuk menghasilkan mekanisme penghindaran pajak yang kompleks. Beberapa perusahaan multinasional besar telah mempertahankan tingkat profitabilitas yang tinggi selama bertahun-tahun karena skema penghindaran pajak yang efisien (PwC, 2013). Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya memahami strategi penghindaran pajak tapi juga menghubungkan penghindaran pajak dengan kinerja keuangan perusahaan-perusahaan ini. Perusahaan yang terdaftar di BEI dapat memperoleh manfaat dari strategi penghindaran pajak yang lebih baik. Manfaat ini dapat diterjemahkan ke kinerja keuangan mereka dalam hal peningkatan profitabilitas atau nilai perusahaan (Desai & Dharmapala, 2009a). Setiap perusahaan selalu berusaha mengelola pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang lebih baik dan oleh karena itu penghematan pajak tersebut harus diterjemahkan ke dalam kinerja keuangan yang lebih baik. Konsep ini penting bagi perusahaan yang terdaftar di BEI yang mungkin berusaha memperbaiki *savings*.

Pada berbagai penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan, hasilnya masih bervariasi. Misalnya, Desai & Dharmapala (2009a) menemukan bahwa penghindaran pajak tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Wang (2012) menemukan bahwa penghindaran pajak meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, studi oleh Katz et al., (2013) menemukan hubungan negatif antara penghindaran pajak dan profitabilitas masa depan. Selanjutnya tidak ada penelitian yang secara khusus berfokus pada perusahaan keluarga yang terdaftar di BEI.

Tidak seperti perusahaan di A.S dan Inggris yang sahamnya tersebar, satu atau beberapa anggota keluarga memiliki saham merupakan tipe perusahaan di Asia. Perusahaan ini sering berafiliasi dengan kelompok usaha yang juga dikontrol oleh keluarga yang sama, dengan kelompok yang terdiri dari beberapa perusahaan publik dan swasta. Keluarga mencapai kontrol yang efektif dari perusahaan-perusahaan di dalam kelompok dengan menggunakan piramida saham dan kepemilikan silang, yang bisa sangat rumit dalam struktur (Claessens,

Djankov, & Lang, 2000). Claessens dkk. (2000) menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan publik di Hongkong, Korea, Philipina, Malaysia, Thailand, Taiwan, Singapura, dan Indonesia memiliki kepemilikan terkonsentrasi, pemilik utama perusahaan tersebut adalah keluarga.

Struktur kepemilikan terkonsentrasi keluarga memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan mengacu pada biaya dan manfaat penghindaran pajak dan ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Dalam hal penghindaran perpajakan, perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi keluarga memiliki potensi keuntungan dan biaya yang lebih besar daripada perusahaan kepemilikan non keluarga (Chen et al., 2010). Hal ini karena pemegang saham keluarga memiliki proporsi saham yang lebih besar (pemegang saham mayoritas) dan masa investasi yang lebih panjang, maka keuntungan yang berasal dari penghematan pajak akan lebih besar pula.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan pada perusahaan keluarga yang terdaftar di BEI.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Keagenan**

Penghindaran pajak menggabungkan lebih banyak dimensi ketegangan agen antara manajer dan investor. Menurut perspektif agensi, masalah yang perlu dipecahkan oleh investor hanyalah ketidakpedulian manajerial. Penghindaran juga mempertimbangkan bentuk lain dari masalah agensi: oportunisme manajerial atau pengalihan sumber daya (Desai dan Dharmapala, 2009b). Desai dan Dharmapala (2006) berpendapat bahwa transaksi penghindaran pajak yang kompleks dapat memberikan pengelolaan alat, masker, dan justifikasi untuk perilaku manajerial oportunistik, seperti manipulasi laba, transaksi pihak terkait, dan aktivitas pengalihan sumber daya lainnya. Dengan kata lain, penghindaran pajak dan pengalihan manajerial bisa saling melengkapi.

Dengan menggunakan analisis kasus, Desai (2005) memberikan bukti tentang bagaimana perilaku oportunistik manajerial dapat difasilitasi oleh penghindaran pajak. Pandangan agensi tentang penghindaran pajak ini menarik perhatian yang meningkat dalam literatur (Hanlon dan Heitzman, 2009). Misalnya, Desai dan Dharmapala (2006) menunjukkan bahwa insentif ekuitas yang diperkuat benar-benar mengurangi penghindaran pajak bagi perusahaan dengan tata kelola yang lemah, sesuai dengan pandangan bahwa penghindaran pajak memfasilitasi pengalihan manajerial. Chen et al., (2010) menemukan bahwa perusahaan keluarga kurang agresif terhadap pajak daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemilik keluarga tampaknya mengabaikan manfaat pajak untuk menghindari biaya non-pajak dari potensi penurunan harga saham yang timbul dari kekhawatiran pemegang saham minoritas tentang tindakan *rent extraction* keluarga yang ditutupi oleh kegiatan penghindaran pajak.

### **Kinerja Keuangan Perusahaan**

Kinerja terdiri dari keluaran aktual atau hasil dari sebuah organisasi yang diukur terhadap keluaran atau sasaran dan tujuan yang diinginkan. Menurut Richard et al., (2009) kinerja mencakup tiga bidang spesifik dari hasil perusahaan yaitu kinerja keuangan, kinerja pasar produk dan return saham. Penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan yang mengacu pada kinerja berdasarkan indikator keuangan. Pengukuran ini meliputi keuntungan, pengembalian aset, dan imbal hasil ekuitas, dan lainnya.

Dalam literatur penghindaran pajak, kinerja keuangan telah diukur dengan berbagai cara. Misalnya, Wang (2012) mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan nilai perusahaan yang secara khusus diukur sebagai nilai pasar aset dibagi dengan nilai buku dari total aset. Desai & Dharmapala (2009b) juga mengukur kinerja keuangan sebagai nilai

perusahaan menggunakan Tobin's Q. Katz, Khan dan Schmidt (2013) mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan profitabilitas. Lebih khusus lagi, mereka mengukur profitabilitas sebagai pengembalian pajak atas equity dan laba atas aset operasi bersih. Penelitian lain menggunakan ukuran seperti biaya ekuitas (Goh, Lee, Lim & Shevlin, 2013) dan biaya pinjaman bank (Hasan, Hoi, Wu & Zhang, 2014).

### **Penghindaran Pajak**

Menurut Hanlon dan Heitzman (2009), penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai pengurangan pajak eksplisit per dolar dari laba akuntansi pra-pajak. Namun, tidak ada definisi penghindaran pajak yang diterima secara universal dalam literatur akuntansi. Berdasarkan definisi yang luas ini, penghindaran pajak merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang mencakup kegiatan yang legal secara sempurna (misalnya, investasi obligasi, tunjangan modal, penggunaan pembiayaan hutang) dan transaksi agresif yang masuk ke wilayah abu-abu (misalnya, *tax shelter*, harga transfer, *treaty shopping*).

Penghindaran pajak dapat berarti perilaku maksimalisasi nilai manajerial atau potensi konflik agensi yang lebih besar antara manajer dan pemegang saham (Wang, 2012). Selama dua dekade terakhir, beberapa penelitian memberi wawasan yang menarik mengapa beberapa perusahaan menghindari pajak lebih banyak daripada penghindaran yang lain. Studi awal berfokus pada karakteristik perusahaan sebagai proksi peluang, insentif dan sumber daya untuk perencanaan pajak untuk menjelaskan mengapa beberapa perusahaan menghindari pajak lebih banyak daripada yang lain (Rego, 2003). Penelitian terbaru memperluas bidang penelitian ini dengan memeriksa bagaimana konflik keagenan dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Menurut berbagai ilmuwan, dua metode telah digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. Metode pertama adalah *Book Tax Difference* (BTD) yang didefinisikan sebagai perbedaan antara laba keuangan dan penghasilan kena pajak (Desai dan Dharmapala, 2009a). Metode kedua adalah *Effective Tax Rate* (ETR) yang didefinisikan sebagai rasio beban pajak penghasilan kini dan laba sebelum pajak (Bradshaw, et al., 2013). BTD mengukur penghindaran pajak dan manajemen laba sedangkan metode ETR hanya mengukur penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada ETD sebagai proxy penghindaran pajak.

### **Ukuran Perusahaan**

Sifat hubungan antara ukuran perusahaan dan kinerja keuangan telah mendapat perhatian yang cukup besar dalam literatur dan telah memicu perdebatan. Beberapa argumen mendukung ukuran perusahaan yang lebih besar dalam mencapai kinerja yang lebih tinggi. Perusahaan besar lebih mungkin mengeksploitasi skala ekonomi dan menikmati kekuatan negosiasi yang lebih tinggi atas klien dan pemasok mereka (Serrasqueiro dan Nunes, 2008). Selain itu, mereka menghadapi lebih sedikit kesulitan dalam mendapatkan akses kredit untuk investasi, memiliki sumber daya manusia manusia yang lebih luas, dan dapat mencapai diversifikasi strategis yang lebih besar (Yang dan Chen, 2009). Di sisi lain, perusahaan kecil menunjukkan karakteristik tertentu yang dapat mengimbangi rintangan yang dikaitkan dengan kekurangan mereka. Mereka memikul lebih sedikit dari masalah agensi dan dicirikan oleh struktur non-hirarkis yang lebih fleksibel, yang mungkin merupakan bentuk organisasi yang tepat dalam mengubah lingkungan bisnis (Yang dan Chen 2009).

Bukti empiris yang ada belum jelas, memberikan dukungan baik terhadap dampak positif dan negatif ukuran perusahaan terhadap kinerja. Yang dan Chen (2009) membandingkan efisiensi teknis UKM dengan perusahaan besar dan tidak meyakinkan tentang hubungan ketika memilih metode estimasi yang berbeda. Dalam sebuah penelitian tentang perusahaan Portugis, Serrasqueiro dan Nunes (2008) menemukan bahwa ukuran berhubungan positif

dengan kinerja tetapi hanya untuk sampel UKM dan bukan untuk perusahaan besar. Temuan serupa oleh Diaz dan Sanchez (2008) dalam konteks Spanyol menyarankan bahwa UKM lebih efisien daripada perusahaan besar yang memberikan dukungan untuk studi sebelumnya yang mengidentifikasi hubungan terbalik antara ukuran dan kinerja. Studi-studi ini menyiratkan hubungan antara ukuran perusahaan dan kinerja yang mungkin belum tentu linier, seperti yang digambarkan dalam Barrett et al., (2010), Yoon (2004), dan Risseuw (1997), yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan di luar tingkat optimal dapat memburuk kinerja.

Hubungan positif antara ukuran perusahaan dan profitabilitas ditemukan oleh Vijayakumar dan Tamizhselvan (2010). Dalam studi mereka, yang didasarkan pada spesifikasi semi-logaritmik sederhana dari model, penulis menggunakan ukuran yang berbeda (penjualan dan total aset) dan profitabilitas (margin laba dan laba atas total aset) sambil menerapkan model pada sampel 15 perusahaan yang beroperasi di India Selatan. Papadogonas (2007) melakukan analisis pada sampel dari 3035 perusahaan manufaktur Yunani untuk periode 1995-1999. Setelah membagi perusahaan menjadi empat kelas ukuran, ia menerapkan analisis regresi yang mengungkapkan bahwa untuk semua kelas ukuran, profitabilitas perusahaan dipengaruhi secara positif oleh ukuran perusahaan. Menggunakan sampel 1020 perusahaan India, Majumdar (1997) menyelidiki dampak bahwa ukuran perusahaan memiliki profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Sementara mengendalikan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, ia menemukan bukti bahwa perusahaan yang lebih besar kurang produktif tetapi lebih menguntungkan.

### **Struktur Modal**

Studi tentang hubungan antara utang dan kinerja, Jensen (1986) menganggap bahwa utang harus mengharuskan eksekutif untuk mempertahankan hanya proyek yang menguntungkan untuk menghindari kebangkrutan perusahaan. Benar bahwa pembiayaan utang akan mendorong para pemimpin untuk menjadi lebih efisien dan efektif dalam posisi yang diduduki. Namun, sebagian besar penelitian yang telah meneliti hubungan utang, struktur kepemilikan, dan kinerja, didasarkan pada data AS dan Prancis (McGahan dan Porter, 1997).

Selain itu, sehubungan dengan ini, Driffield et al., (2007) mengeksplorasi kemungkinan interaksi antara utang dan kinerja perusahaan menggunakan sistem persamaan simultan. Mereka mengusulkan dua hipotesis alternatif untuk hubungan terbalik ini. Hipotesis pertama berfokus pada perusahaan yang paling sukses. Dalam kasus terakhir, perusahaan yang paling sukses mengurangi tingkat utang mereka untuk melindungi kekayaan pemegang saham dalam risiko kebangkrutan (Saliha, et al., 2011). Dalam konteks yang sama, Abdennadher (2006) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan utang terhadap kinerja dalam konteks Tunisia untuk studi dua puluh perusahaan yang terdaftar selama periode 1996-2000.

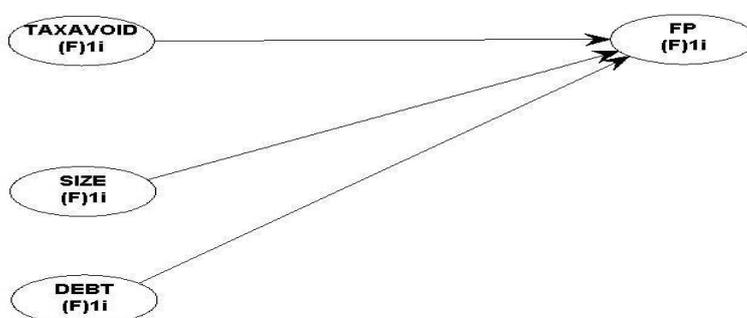
### **Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Kegiatan penghindaran pajak secara tradisional dipandang sebagai perangkat penghematan atau perencanaan pajak yang mengalihkan sumber daya dari negara kepada pemegang saham dan karenanya harus meningkatkan nilai perusahaan setelah pajak. Namun, sebuah literatur yang muncul dalam ekonomi keuangan menekankan pentingnya implikasi biaya dari penghindaran pajak dan menunjukkan bahwa penghindaran pajak mungkin tidak selalu meningkatkan kekayaan pemegang saham luar. Dari teori keagenan, penghindaran pajak tidak meningkatkan kinerja suatu organisasi karena kegiatan penghindaran pajak dapat mempermudah *managerial rent extraction* dalam berbagai bentuk. Karena biaya gabungan, yang mencakup biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan perencanaan pajak, tambahan biaya kepatuhan, dan biaya non-pajak (misalnya, biaya agensi pada khususnya), mungkin

lebih besar daripada manfaat pajak kepada pemegang saham, kegiatan penghindaran pajak berpotensi mengurangi nilai perusahaan.

Konsisten dengan teori agensi, Desai dan Dharmapala (2006) menemukan hubungan negatif antara tingkat kompensasi insentif dan tingkat *tax sheltering*. Asosiasi negatif ini terutama didorong oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki tata kelola yang rendah. *High power incentives*, seperti kompensasi berbasis opsi, kepentingan manajerial yang selaras dengan pemegang saham seharusnya mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mencegah *managerial rent extraction*. Hubungan negatif antara high-powered incentive dan penghindaran pajak menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang memiliki tata kelola yang rendah mengingat sampel yang digunakan adalah perusahaan keluarga, kecenderungan ke arah penghindaran perpajakan lebih banyak diimbangi oleh fakta bahwa pengurangan pengalihan dikaitkan dengan pengurangan *tax sheltering*.

H<sub>1</sub> : Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 sampai dengan 2014. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam memperoleh sampel penelitian ke dalam kategori perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi keluarga. Kategori perusahaan keluarga didefinisikan berdasarkan definisi yang digunakan oleh Giovannini (2010) mengacu pada komponen skala F-PEC (dimensi *Power*) oleh Astrachan et al. (2002).

Skala yang mendasari dimensi *power* telah dikelompokkan, untuk membedakan sampel menjadi empat subkelompok. Skala interval F-PEC dari 0 sampai 0,5 menunjukkan bisnis non keluarga; dari 0,5 ke 1 dapat didefinisikan sebagai bisnis keluarga yang lemah, dari 1 sampai 1,5 bisnis keluarga normal, dan untuk nilai di atas 1,5 sebagai bisnis keluarga yang kuat (Giovannini, 2010). Sebuah perusahaan termasuk dalam kelompok sampel penelitian ini jika nilai F-PEC  $\geq 0,5$ , dengan rumus berikut (Astrachan et al., 2002):

$$F - PEC = \frac{EQ \text{ fam}}{EQ \text{ tot}} + \frac{BoD \text{ fam}}{BoD \text{ tot}} + \frac{BoC \text{ fam}}{BoC \text{ tot}}$$

Keterangan:

Eqfam : Kepemilikan keluarga

EQtot : Total Kepemilikan

BoDfam : Jumlah anggota keluarga yang menjadi Dewan Direksi

BoDtot : Jumlah Dewan Direksi  
BoCfam : Jumlah anggota keluarga yang menjadi Dewan Komisaris  
BoCtot : Jumlah Dewan Komisaris

Data kepemilikan perusahaan dikumpulkan secara manual dari pernyataan proksi, di mana perusahaan harus mengidentifikasi semua pemegang saham yang memiliki hak kepemilikan atau kontrol atau arahan atas saham yang membawa hak suara (Landry et al., 2013). Mengikuti penelitian sebelumnya (Anderson & Reeb, 2003; Claessens et al., 2000), perusahaan keluarga merujuk pada pendiri atau anggota keluarga (baik oleh darah maupun pernikahan) adalah manajemen eksekutif, direktur, atau *block holders*.

Claessens dkk. (2000) menemukan bahwa perusahaan publisitas di Indonesia, kontrol perusahaan ditingkatkan melalui struktur piramida 66,9% dengan pemilik utama; 1,3% lintas holding antar perusahaan; 53,4% pemilik pengendali saja; dan 84,6% CEO, ketua dewan, atau wakil ketua berasal dari keluarga pengawas. Dengan demikian, penentuan kepemilikan keluarga menelusuri rantai piramidal dan cross-holding secara terpisah dan kemudian menghitung persentase kepemilikan individu (anggota keluarga) dan / atau perusahaan (pemilik akhir adalah satu keluarga/ kelompok keluarga).

Untuk mengetahui apakah anggota keluarga dilibatkan dalam dewan komisaris dan direksi perusahaan, pernyataan proksi digunakan untuk mendapatkan identitas dewan direksi dan anggota eksekutif. Seseorang diidentifikasi sebagai anggota keluarga jika dia memiliki nama belakang yang sama dengan keluarga pemilik atau diberi nama sebagai anggota keluarga dalam pernyataan proksi. Informasi tentang pendiri perusahaan tersebut diperoleh dari pernyataan proksi, situs atau web perusahaan terkait, laporan tahunan, majalah online SWA di rubrik Youngster Inc., majalah online Forbes Indonesia dan beberapa situs bisnis lain yang mempublikasikannya.

Adapun kriteria lain untuk penyeleksian perusahaan sampel, sebagai berikut :

1. Mempublikasikan laporan keuangan diaudit konsisten di Bursa Efek Indonesia dan memiliki data laporan keuangan yang lengkap dari tahun 2010 – 2014. Alasan pemilihan periode dimulai dari 2010 dikarenakan reformasi tarif pajak terbaru berlaku mulai tahun 2010.
2. Tidak mengalami kerugian selama periode 2010 – 2014 karena perusahaan tersebut akan menghasilkan tarif pajak efektif (ETR) yang terdistorsi (Richardson dan Lanis, 2007).
3. Tidak mempunyai *Loss carry forward* pada laporan keuangan 2010 – 2014. Adanya *Loss carry forward* (kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang) akan membuat hasil tarif pajak efektif (ETR) yang didapat sulit untuk diinterpretasi (Adhikari, et al., 2006).
4. Laporan keuangan tidak menggunakan mata uang asing.

## **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

### **Variabel Dependen**

Alasan profitabilitas digunakan sebagai variabel dependen karena perusahaan, yang lebih menguntungkan cenderung memiliki ETR yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan akan terlihat kurang agresif dalam pajak (Chen, et al., 2010). Profitabilitas diukur dengan ROA (*Return On Assets*), yang membandingkan jumlah laba sebelum pajak dengan total aset.

### **Variabel Independen**

Penelitian sebelumnya telah mempertimbangkan tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate*(ETR) sebagai proksi untuk beban pajak perusahaan (Gupta & Newberry, 1997; Porcano, 1986; Salihu, Obid, & Annuar, 2013; Wu, et al., 2012). Ini sekaligus merupakan indeks penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas penghindaran pajak. Studi ini

mengadopsi tarif pajak efektif (ETR) untuk mewakili penghindaran pajak (strategi berisiko dan tidak berisiko) (Badertscher, et al., 2013). ETR didefinisikan berdasarkan GAAP sebagai beban pajak penghasilan kini (*current income tax expense*) dibagi dengan laba sebelum pajak (*pretax income*).

### Variabel Kontrol

#### Ukuran Perusahaan

Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa perusahaan besar akan cenderung memiliki ETR yang lebih rendah, ini karena perusahaan yang lebih besar mengelola sumber daya mereka untuk membuat perencanaan pajak yang lebih baik juga (teori kekuatan politik). Namun, tidak semua perusahaan dapat selalu menggunakan kekuatan mereka untuk melakukan perencanaan pajak karena resistensi kemungkinan untuk menjadi perhatian atau target kebijakan regulasi - *political cost theory* (Watts dan Zimmerman, 1986; Richardson dan Lanis, 2007). Oleh karena itu, ukuran perusahaan (Ukuran) digunakan sebagai variabel kontrol. Selain itu, ukuran perusahaan diukur dengan log Total Aset.

#### Struktur Modal

Pembayaran bunga atas pembiayaan perusahaan melalui utang dapat membuat ETR perusahaan lebih rendah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa bunga biaya pinjaman adalah biaya yang dapat dikreditkan atau sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak. Penelitian ini menggunakan rumus berikut untuk mengukur ukuran Struktur Modal:

$$\text{Leverage (DEBT)} = (\text{Hutang jangka panjang}) / (\text{Total Aset})$$

#### Teknik Analisis

Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data dalam hal skor rata-rata dan standar deviasi di antara statistik deskriptif lainnya. Kedua, untuk menguji tingkat penghindaran pajak di antara perusahaan, nilai rata-rata dan median digunakan untuk menginterpretasikan hasil. Untuk menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap kinerja, analisis regresi dilakukan. Analisis dilakukan menggunakan teknik *Ordinary Least Square* (OLS) dengan bantuan perangkat lunak analisis WarpPLS versi 5.0. Model yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

$$FP = \alpha + \beta_1 \text{TAXAVOID} + \beta_2 \text{SIZE} + \beta_3 \text{DEBT} + e_1$$

dimana:

FP	= Kinerja Keuangan Perusahaan
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1$ - $\beta_3$	= Koefisien
TAXAVOID	= Penghindaran Pajak ( <i>Tax Aggressiveness</i> )
SIZE	= Ukuran Perusahaan
DEBT	= Struktur Modal

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Set data yang digunakan dalam analisis utama adalah data panel sejumlah 215 data observasi dari 43 perusahaan milik keluarga untuk periode 2010 - 2014 dan merupakan perusahaan – perusahaan non keuangan, konsisten dengan penelitian sebelumnya. Proses pemilihan sampel ditunjukkan tabel berikut.

**Tabel 1. Pemilihan Sampel**

Sampel	Perusahaan	Data Observasi
Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI (2010-2014)	288	1440
<b>Pengurangan sampel berdasarkan kriteria</b>		
Perusahaan dengan permodalan asing (Non-PMDN)	72	
Perusahaan yang memperoleh skala FPEC < 0,5	145	
Penyajian laporan keuangan tidak dalam rupiah	7	
Perusahaan menderita kerugian	17	
Perusahaan melaporkan kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masadating	3	
Perusahaan yang tidak mempublikasi laporan keuangan dan laporan tahunan	1	
	( 245 )	( 1225 )
<b>Sampel akhir</b>	<b>43</b>	<b>215</b>

### Statistik Deskriptif

**Tabel 2. Statistik Deskriptif Sampel Perusahaan**

	FP	TAXAGG	SIZE	DEBT
Mean	0.1014	0.0297	6.2896	0.1908
Median	0.0782	0.0182	6.2826	0.1590
Maximum	0.4324	0.4558	7.7652	0.6603
Minimum	0.0001	0.0001	4.9532	0.0013
Std. Dev.	0.0779	0.0446	0.6399	0.1473
Skewness	1.5714	5.9406	0.1079	0.7524
Kurtosis	6.0276	50.0353	2.1445	2.8744
Sum	21.8001	6.3865	1352.272	41.0307
Sum Sq. Dev.	1.2995	0.4253	87.6466	4.6436
Observations	215	215	215	215

Tabel 2 menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki rata-rata 0,1014 dan standar deviasi 0,0779. Itu adalah kinerja keuangan dari 43 perusahaan yang terdaftar selama periode studi tercatat bahwa rata-rata ROA sebesar 10,14%. Namun, kisaran nilai tertinggi mencapai 43,42% dan terendah sebesar 0,01%. Penghindaran pajak rata-rata perusahaan sebesar 2,97% dengan penghindaran pajak maksimum mencapai 45,58% untuk 43 perusahaan yang terdaftar selama periode penelitian.

Nilai rata-rata struktur modal yang diukur dengan *leverage* adalah 0,1908 yang menyiratkan 19,08% dari total kewajiban jangka panjang dibagi dengan total aset perusahaan selama periode penelitian.

### Model Regresi

Metode regresi yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode *ordinary least square*. Ini digunakan untuk menentukan garis yang paling cocok untuk model melalui

meminimalkan jumlah kuadrat jarak dari titik ke garis yang paling sesuai. Melalui metode ini, analisis diasumsikan linearitas antara variabel dependen dan variabel independen. Hasil regresi diambil untuk ringkasan model, analisis varians dan koefisien regresi.

### Pengujian Model (Goodness of Fit)

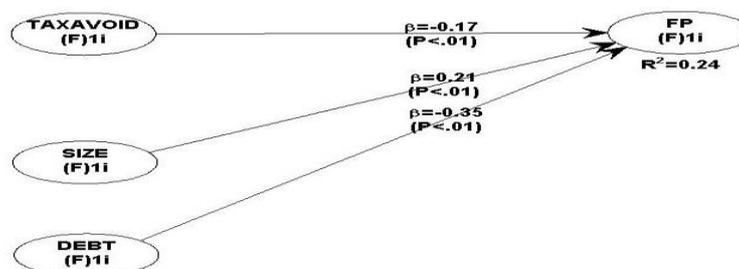
Hasil estimasi model menunjukkan bahwa kriteria goodness of fit telah terpenuhi, nilai Average R-squared (ARS) dan Average Path Coefficient (APC) secara statistik signifikan, dan nilai Average Variance Inflation Factor (AVIF) lebih kecil dari 5 (Kock, 2011). Hasil ini disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3. Hasil Pegujian Model (Goodness of Fit)**

Jalur	Hasil Pengaruh		Keterangan
	Koefisien	Prob.	
TAXAVOID →FP	-0,174	0,004***	H1 is accepted
SIZE →FP	0,206	<0,001***	
DEBT →FP	-0,354	<0,001***	
<b>Model Fit Indicators</b>			
Average Path Coefficient (APC)	0,243	<0,001***	
Average R-square (ARS)	0,245	<0,001***	
Average Variance Inflation Factor (AVIF)	1,034		

Catatan: \*, \*\*, dan \*\*\* menunjukkan signifikansi (satu-sisi) pada 0,10; 0,05; dan 0,01 tingkat, masing-masing.

### Pengujian Hipotesis



**Gambar 2. Hasil Output dengan WarpPls 5.0**

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien (-0,174) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 artinya bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan sehingga H1 diterima.

Peningkatan unit dalam ukuran perusahaan akan menyebabkan peningkatan 0,206 unit (20,6%) kinerja keuangan perusahaan. Peningkatan unit dalam rasio leverage akan mengarah ke 0,354 unit (35,4%) penurunan kinerja keuangan perusahaan yang termasuk dalam perusahaan keluarga.

### SIMPULAN

Reformasi perpajakan telah menjadi pilar utama reformasi ekonomi secara keseluruhan yang banyak diupayakan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan anggaran pemerintah. Dengan menggunakan data pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia, Penelitian ini menganalisis dampak penghindaran pajak perusahaan terhadap kinerja perusahaan keluarga di Indonesia. Hal ini diperlukan karena penghindaran pajak, jika tidak ditindak dengan hati-hati, akan memperlumahkan pendapatan pemerintah yang akan diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku penghindaran pajak perusahaan keluarga di Indonesia mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan mereka.

Penghindaran pajak telah didefinisikan sebagai pengurangan kewajiban pajak eksplisit perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010). Oleh karena itu, penghindaran pajak terdiri dari strategi perencanaan pajak dengan kegiatan legal yang sempurna pada penghindaran pajak yang ekstrim dan ilegal pada yang lain (Hanlon & Heitzman, 2010). Penghindaran pajak perusahaan secara tradisional dipandang sebagai alat pengurang pajak yang mengalihkan bunga dari pemerintah kepada pemegang saham untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, meskipun perluasan badan kerja pada teori agensi menekankan bahwa penghindaran pajak terkait erat dengan tata kelola perusahaan karena implikasi biaya agensi.

Dalam prakteknya, kompleksitas dan ambiguitas penghindaran pajak dapat melindungi manajer yang terlibat dalam berbagai bentuk *managerial rent extraction* seperti manipulasi laba dan transaksi orang dalam yang akan mengurangi arus kas setelah pajak (Desai & Dharmapala, 2009; Desai, Dyck, & Zingales, 2007). Kasus Enron adalah contoh yang mencolok. Pada 1990-an, Enron memanfaatkan transaksi pembiayaan terstruktur untuk menghindari pajak, yang mengarah ke penuntutan pemerintah dan keruntuhannya. Di luar itu, perusahaan juga harus menanggung biaya penghindaran pajak gabungan, yang termasuk perencanaan pajak langsung, kepatuhan dan biaya non-pajak. Lee, Dobiyaniski, dan Minton (2015) menyatakan bahwa jika pemegang saham tidak dapat sepenuhnya memahami kalkulasi biaya-manfaat, kegiatan penghindaran pajak benar-benar dapat mengurangi kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penghindaran pajak perusahaan mungkin tidak selalu meningkatkan nilai perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. 2006. Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*. 25(5): 574-595.
- Anderson, R. C., & Reeb, D. M. 2003. Founding-family ownership and firm performance: evidence from the S&P 500. *The journal of finance*. 58(3): 1301-1328.
- Astrachan, J. H., Klein, S. B., & Smyrnios, K. X. (2002). The F-PEC scale of family influence: A proposal for solving the family business definition problem1. *Family Business Review*. 15(1): 45-58.
- Badertscher, B.A., Katz, S.P., & Rego, S.O. 2013. The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*. 56(2): 228-250.
- Barrett, C.B., Bellemare, M.F., and Hou, J.Y. 2010. Reconsidering Conventional Explanations of the Inverse Productivity-Size Relationship. *World Development*. 38 (1): 88-97.
- Bradshaw, M. Liao, G. and Ma, M. 2013. Ownership Structure and Tax Avoidance: Evidence from Agency Costs of State Ownership in China. Available at: <http://ssrn.com/abstract=2239837>.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., and Shevlin, T.J. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-family Firms? *Journal of Financial Economics*. 95: 41-61.
- Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. 2000. The separation of ownership and control in East Asian corporations. *Journal of financial Economics*. 58(1): 81-112.

- Diaz, M.A. and Sanchez, R. 2008. Firm Size and Productivity in Spain: a Stochastic Frontier Analysis. *Small Business Economics*. 30 (3): 315-323.
- Desai, M.A., & Dharmapala, D. 2006. Corporate Tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*. 79(1): 145-179.
- Desai, M.A., Dyck, A., & Zingales, L. 2007. Theft and taxes. *Journal of Financial Economics*, 84(3), 591-623.
- Desai, M.A., and Dharmapala, D. 2009. Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *The Review of Economics and Statistics*. 91: 537-546.
- Desai, M.A., & Dharmapala, D. 2009. Earnings management, corporate tax shelters, and book-tax alignment. *National Tax Journal*. 169-186.
- Driffield, N., Mahambare, V., and Pal, S. 2007. How Does Ownership Structure Affect Capital Structure and Firm Performance? Recent Evidence from East Asia. *Economics of Transition*. 15 (3): 535-573.
- Dyreg, S.D., Hanlon, M., & Maydew, E.L. 2008. Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*. 83(1): 61-82.
- Goh, B.W., Lee, J., Lim, C.Y., and Shevlin, T. 2013. The Effect of Corporate Tax Avoidance on the Cost of Equity. Available at: <http://ssrn.com/abstract=2237742>.
- Giovannini, R. Corporate governance, family ownership and performance. 2010. *J. Manag. Gov.* 14: 145-166.
- Gupta, S., & Newberry, K. 1997. Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*. 16(1): 1-34.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. 2010. A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*. 50(2): 127-178.
- Jensen M. 1986. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. *American Economic Review*. 76(2): 323-329.
- Hasan, I., Hoi, C.K., Wu, Q, and Zhang, H. 2014. Beauty is in the Eye of the Beholder: The Effect of Corporate Tax Avoidance on the Cost of Bank Loans. *Bank of Finland Research Discussion Papers 3*, Bank of Finland.
- Katz, S., Khan, U. and Schmidt, A.P. 2013. Tax Avoidance and Future Profitability. Available at: <http://ssrn.com/abstract=2227149>.
- Koester, A. 2011. Investor Valuation of Tax Avoidance through Uncertain Tax Positions. *Working Paper*, Georgetown University.
- Landry, S., Deslandes, M., & Fortin, A. 2013. Tax aggressiveness, corporate social responsibility, and ownership structure.
- latLee, B.B., Dobiyanski, A., & Minton, S. 2015. Theories and empirical proxies for corporate tax avoidance. *The Journal of Applied Business and Economics*. 17(3): 21-34.
- Majmumdar SK. 1997.. The Impact of Size and Age in Firm-Level Performance: Some Evidence from India. *Review of Industrial Organization*. 12: 231-241.
- McGahan, A.M. and Porter, M.E. 1997. The Emergence and Sustainability of Abnormal Profits. *Working Paper*, Harvard Business School.
- Papadogonas, T.A. 2007. The Financial Performance of Large and Small Firms: Evidence from Greece. *International Journal of Financial Service Management*. 2(1/2): 14-20.
- Porcano, T. 1986. Corporate tax rates: Progressive, proportional, or regressive. *Journal of the American Taxation Association*. 8(2): 17-31.
- PwC. 2013. Growing Scrutiny of international transactions. *Journal of International Transfer Pricing*. 33:1-6.
- Rego, S. (2003). Tax-avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*. 20 (4): 805-833.

- Richard, P. J., Devinney, Y., and Johnson, G. 2009. Measuring Organizational Performance: Towards Methodological Best Practice. *Journal of Management*. 35(1): 113-133.
- Richardson, G., Lanis, R. 2007. Determinants of variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*. 26: 689- 704.
- Risseuw, P. 1997. *Estimating the Determinants of Financial Performance of Very Small Service Firms in United States Association for Small Business and Entrepreneurship*. San Francisco, California.
- Robinson, L., and Schmidt, A. 2012. Firm and Investor Responses to Uncertain Tax Benefit Disclosure Requirements. *Working Paper*, Dartmouth University and North Carolina State University.
- Saliha, T. and Abdessatar, A. 2011. The Determinants of Financial Performance: an Empirical Test Using the Simultaneous Equations Method. *Economics and Finance Review*. 1(10): 01 – 19.
- Salihu, I.A., Obid, S.N.S., & Annuar, H.A. 2013. Measures of corporate tax avoidance: Empirical evidence from an emerging economy. *International Journal of Business and Society*. 14(3): 412-427.
- Serrasqueiro, Z.S. and Nunes, P.M. 2008. Performance and Size: Empirical Evidence from Portuguese SMEs. *Small Business Economics*. 31 (2): 195-217.
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJeko6A%3D>
- Vijayakumar A, and Tamizhselvan, P. 2010. Corporate Size and Profitability: An Empirical Analysis. *Journal for Bloomers of Research*. 3(1): 44-53.
- Wang, X. 2012. Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value. *Working Paper*, University of Texas Austin.
- Watts, R. and Zimmerman, J. 1978. Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards. *The Accounting Review*. 53 (1): 112-134.
- Watts, R., Zimmerman, J. 1986. *Towards a Positive Theory of Accounting*. New Jersey: Prentice-Hal
- Wu, L., Wang, Y., Luo, W., & Gillis, P. 2012. State ownership, tax status and size effect of effective tax rate in China. *Accounting and Business Research*. 42(2): 97-114.
- Yang, C.H. and Chen, K.H. 2009. Are Small Firms Less Efficient? *Small Business Economics*. 32 (4): 375-395.
- Yoon, S. 2004. A Note on the Market Structure and Performance in Korean Manufacturing Industries. *Journal of Policy Modelling*. 26 (6): 733-746.